DIPLOMASI KEMANUSIAAN *TURKISH COOPERATION AND COORDINATION AGENCY* TERHADAP ETNIS ROHINGYA TAHUN 2012-2024

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

ROFA RUBIAH AL ADAWIYAH

20323169

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

DIPLOMASI KEMANUSIAAN *TURKISH COOPERATION AND COORDINATION AGENCY* TERHADAP ETNIS ROHINGYA TAHUN 2012-2024

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

ROFA RUBIAH AL ADAWIYAH

20323169

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Diplomasi Kemanusiaan *Turkish Cooperation and Coordination Agency* terhadap Etnis Rohingya Tahun 2012-2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

12 Maret 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P, M.Sc.	
2	Derina Faslig Silitonga, S.Hub.Int., M.H.I.	
3	Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.	
4	Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Ph.D.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 12 Maret 2025



Rofa Rubiah Al Adawiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GRAFIK vii
DAFTAR DIAGRAM viii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR SINGKATAN x
ABSTRAK xi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Cakupan Penelitian 8
1.5 Tinjauan Pustaka 9
1.6 Kerangka Pemikiran 11
1.7 Argumen Sementara 14
1.8 Metode Penelitian 15
1.8.1 Jenis Penelitian 15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 15
1.8.4 Proses Penelitian 16
1.9 Sistematika Pembahasan 16
BAB 2 17
SEJARAH DAN KONDISI KEMANUSIAAN ETNIS ROHINGYA 17
2.1 Keadaan Etnis Rohingya di Myanmar 17
2.1.1 Asal Usul dan Sejarah Konflik Etnis Rohingya 18
2.1.2 Ketiadaan Status Kewarganegaraan yang Memperburuk Konflik 26
2.2 Dampak Konflik Terhadap Kondisi Kemanusiaan Etnis Rohingya 29
2.3 Motivasi Turki Membantu Mengatasi Isu Kemanusiaan Rohingya 37
2.3.1 Solidaritas Keagamaan 38
2.3.2 Alasan Kemanusiaan 40
BAB 3 42

UPAYA DIPLOMASI KEMANUSIAN TURKI MELALUI TIKA DALAM KONFLIK ROHINGYA 42
3.1 Proses Diplomasi Kemanusiaan TIKA terhadap Etnis Rohingya..... 45
3.1.1 Negosiasi Akses Terhadap Etnis Rohingya yang Membutuhkan Bantuan dan Perlindungan 45
3.1.2 Diplomasi TIKA dalam Melakukan Monitoring Bantuan..... 47
3.1.3 Diplomasi TIKA dalam Mendukung Individu dan Institusi Lokal 51
BAB 4 60
4.1. Kesimpulan 60
4.2. Rekomendasi..... 61
DAFTAR PUSTAKA 62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pelanggaran HAM yang Dialami Etnis Rohingya 30

Tabel 3.1 Bantuan Turki Terhadap Etni Rohingya..... 55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Jumlah Pengungsi Rohingya di Baladesh 37

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Jumlah Kekerasan yang Dialami Etnis Rohingya 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kebutuhan Pokok Etnis Rohingya..... 34

DAFTAR SINGKATAN

AA : *Arakan Army*

ACLAB : *Alliance for Cooperation and Legal Aid Bangladesh*

AFAD : *Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı*

AKP : *Adalet ve Kalkınma Partisi*

BCL : *Burma Citizenship Law*

BISEG : *Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği*

HAM : Hak Asasi Manusia

HRW : *Human Right Watch*

IOM : *International Organization of Migration*

IHH : *İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı*

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

MFS : *Medecins Sans Frontieres*

NGO : *Non-Governmental Organization*

OIC : *Organization of Islamic Cooperation*

OKI : Oganisasi Kejasama Islam

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

PCO : *Program Coordination Office*

QGO : *Quasi-Governmental Organization*

TDF : *Turkish Diyanet Foundation*

TIKA : *Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı*

UNHCR : *United Nations High Commissioner for Refugees*

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari isu konflik etnis yang terjadi di Myanmar. Dari isu tersebut, penelitian ini mengangkat topik upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh *Turkish Cooperation and Coordination Agency* (TIKA) dalam isu kemanusiaan etnis Rohinya yang terjadi di Rakhine. Dengan menggunakan konsep *humanitarian diplomacy* menurut Larry Minear dan Hazel Smith, penelitian ini menganalisis upaya-upaya TIKA dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada komunitas Rohingya yang menghadapi kekerasan dan penganiayaan. TIKA, sebagai Lembaga kemanusiaan utama, berperan aktif dalam menggerakkan bantuan internasional, menjalin kerjasama dengan lembaga kemanusiaan lainnya, dan mempengaruhi masyarakat global. Penelitian ini menemukan bahwa diplomasi kemanusiaan TIKA mencakup berbagai langkah, mulai dari pemberian bantuan langsung, pemantauan bantuan, serta dukungan untuk meningkatkan kapasitas komunitas lokal. Melalui pendekatan ini, TIKA tidak hanya memperkuat peranannya sebagai aktor diplomasi kemanusiaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi upaya penyelesaian krisis kemanusiaan tersebut.

Kata-kata Kunci: Diplomasi kemanusiaan, Turki, Rohingya, Myanmar, konflik etnis,

ABSTRACT

This research departs from the issue of ethnic conflict that occurred in Myanmar. From this issue, this research raises the topic of humanitarian diplomacy efforts made by the Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) in the Rohingya ethnic humanitarian issue that occurred in Rakhine. Using the concept of humanitarian diplomacy according to Larry Minear and Hazel Smith, this research analyzes TIKA's efforts in providing assistance and support to the Rohingya community facing violence and persecution. TIKA, as the main humanitarian agency, plays an active role in mobilizing international aid, cooperating with other humanitarian agencies, and influencing the global community. This research found that TIKA's humanitarian diplomacy includes various steps, ranging from direct aid delivery, aid monitoring, and support to increase the capacity of local communities. Through this approach, TIKA not only strengthens its role as a humanitarian diplomacy actor, but also has a positive impact on efforts to resolve the humanitarian crisis.

Keywords: *Humanitarian diplomacy, Turkey, Rohingya, Myanmar, ethnic conflicts*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik internal antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya telah menarik perhatian masyarakat dunia. Konflik ini melibatkan dimensi agama di dalamnya, yang di mana etnis Rakhine yang mayoritas beragama Buddha menunjukkan ketidaksukaan terhadap etnis Rohingya. Dalam buku *Ethnoreligious Conflict in the Late Twentieth Century: A General Theory* karya Jonathan Fox, dikatakan bahwa konflik yang melibatkan agama akan menjadi semakin rumit apabila melibatkan isu etnisitas, yang dimana kelompok-kelompok dari etnis tertentu memeluk dan menganut agama yang berbeda, hal ini dikenal dengan istilah konflik etnis dan agama (Fox 2003).

Konflik antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya telah berlangsung dari berabad-abad yang lalu dan terdapat sejarah panjang di dalamnya. Memasuki abad ke-20, konflik etnis yang terjadi di Myanmar semakin panas sehingga menyebabkan Rohingya menjadi terasingkan di negeri sendiri. Burma atau yang sekarang dikenal sebagai Myanmar merupakan negara yang kaya akan etnis dan agama, dengan keanekaragaman tersebut menjadikan Myanmar sering mengalami perselisihan yang melibatkan etnis dan agama. Perselisihan yang tidak segera ditangani dengan tepat lama-kelamaan akan menjadi konflik yang berkepanjangan, seperti halnya konflik etnis di Rakhine yang telah terjadi dari berabad-abad tahun yang lalu.

Menurut sejarah, etnis Rohingya merupakan nama kelompok orang yang telah menetap di wilayah Arakan atau yang sekarang dikenal dengan Rakhine. Kelompok ini telah menetap di di Arakan atau Rakhine sejak abad ke-7 Masehi

sebelum negara Myanmar terbentuk. Pada tahun 1948, negara Myanmar merdeka dengan Arakan (Rakhine) sebagai bagian dari wilayah Myanmar, dan etnis muslim Rohingya diakui sebagai etnis asli dari Myanmar (Nurrachman 2023). Akan tetapi masyarakat Buddha Myanmar meyakini bahwa etnis Muslim Rohingya bukan etnis asli dari negara Myanmar, melainkan imigran asal Bengali/Bangladesh. Hal inilah yang menyebabkan awal mula terjadinya perselisihan antara etnis Budha Myanmar dan etnis Muslim Rohingya terus memanas (Moh 2019).

Pemerintah negara Myanmar menolak memberikan status kewarganegaraan bagi minoritas Rohingya dan enggan mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar seperti yang tercantum dalam kebijakan *Burma Citizenship Law* (BCL) yang dimana warga Rohingya di Myanmar tidak memiliki kewarganegaraan, hak atas tanah, pendidikan dan pekerjaan yang layak dan cukup, serta etnis Rohingya tidak termasuk dari 135 etnis yang absah di negara Myanmar (Ichikaya Mitzy 2017). Pemerintah menganggap etnis Rohingya sebagai imigran ilegal yang digolongkan sebagai kaum Bengali/Bangladesh karena memiliki karakteristik budaya dan fisik yang mirip dengan orang Bangladesh, oleh karena hal tersebut etnis Rohingya sering mendapatkan perlakuan diskriminasi serta kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan etnis Budha Myanmar (Karina 2020).

Ketegangan yang terjadi antara etnis Rakhine Budha dan Rohingya semakin meningkat setelah insiden yang terjadi pada 2012, surat kabar *The New Light of Myanmar* melaporkan berita mengenai pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita Rakhine beragama Buddha yang bernama Ma Thida Htwe, kemudian terjadi insiden yang menewaskan 10 orang Muslim Rohingya. Kejadian ini memicu kemarahan warga lokal, sehingga mereka beramai-ramai melakukan pembalasan

dengan membunuh warga Muslim Rohingya yang sedang berada dalam bus menuju Yangon. Kasus-kasus pembunuhan ini kemudian menjadi pemicu terjadinya konflik yang lebih besar di Rakhine, Myanmar (Waluyo 2013).

PBB menyebutkan bahwa etnis Muslim Rohingya merupakan salah satu etnis minoritas yang paling sering mendapatkan diskriminasi dan menjadi korban persekusi dari etnis-etnis lainnya, dan hingga saat ini pelanggaran HAM masih terus terjadi kepada etnis Muslim Rohingya. PBB mengkategorikan aksi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya sebagai kejahatan kemanusiaan pembersihan etnis atau genosida (O'Brien and Hoffstaedter 2020). UNHCR mencatat gelombang kekerasan baru terhadap Muslim Rohingya yang terjadi pada tahun 2017 mengakibatkan hampir satu juta jiwa mengungsi ke negara tetangga Bangladesh. Hingga kini Muslim Rohingya terus melakukan perjalan untuk mencari tempat yang aman di negara-negara Asia lainya seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia (Khan 2024).

Pada tahun 2022, krisis Rohingya semakin meningkat sehingga menyebabkan banyak orang Rohingya terpaksa mengungsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Menurut laporan UNHCR terdapat sekitar 3.700 pengungsi Rohingya berusaha melarikan diri dengan perahu dari Bangladesh dan Myanmar untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya (UNHCR 2022). Pada tahun 2023 krisis yang terjadi semakin kompleks, hal ini mengakibatkan sebanyak 6.500 pengungsi Rohingya berusaha melakukan perjalanan darat dan laut untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik, dan terdapat sekitar 600 orang yang tewas atau hilang di laut (UNHCR 2023b).

Kekerasan yang terjadi di Myanmar telah membuat dunia internasional mengecam perbuatan pemerintah Myanmar. Turki menjadi salah satu negara yang mengecam pemerintahan Myanmar atas kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya. Turki memberi perhatian lebih atas kekerasan dan diskriminasi yang diterima etnis Rohingya, hal ini didasari oleh kesamaan Anya dalam memeluk agama Islam (Finaldin and Maulani 2023). Sebagai negara mayoritas Muslim, Turki merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu etnis Muslim Rohingya yang mengalami penindasan. Keprihatinan ini bukan hanya didorong oleh faktor agama, tetapi juga oleh solidaritas kemanusiaan yang menderita di tengah kekerasan dan penganiayaan.

Melalui berbagai lembaga-lembaga kemanusiaannya, Turki berusaha mengirim bantuan kemanusiaan langsung ke pengungsi Rohingya, baik di Bangladesh maupun di wilayah lain yang terdampak. Melalui lembaga kemanusiannya seperti TIKA, Turki telah memberikan bantuan berupa pembangunan sekolah, rumah sakit, sumur air bersih, pusat pelatihan, serta distribusi makanan dan kebutuhan pokok bagi para korban terdampak. Bantuan ini bertujuan untuk meredakan penderitaan fisik yang dialami oleh pengungsi akibat pengungsian massal dan kerusakan yang terjadi akibat konflik (Chowdury 2018).

TIKA (*Turkish Cooperation and Coordination Agency*) menjadi aktor penting dalam diplomasi kemanusiaan karena berperan sebagai alat utama dalam strategi *soft power* Turki untuk memperluas pengaruhnya di dunia internasional. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan, diplomasi budaya, dan proyek pembangunan kapasitas, TIKA tidak hanya memberikan dukungan kepada negara-negara terdampak konflik dan bencana, tetapi juga

membantu membangun hubungan strategis yang menguntungkan bagi Turki. Melalui berbagai program-program bantuannya, TIKA menciptakan hubungan baik di antara negara penerima dan memperkuat citra Turki sebagai negara yang peduli terhadap krisis global. Selain itu, TIKA memungkinkan Turki untuk menjalin kerja sama internasional berdasarkan akar budaya dan sejarah bersama, sehingga memperkuat pengaruhnya di dunia serta kawasan yang memiliki keterkaitan historis dengan Turki. Dengan pendekatan ini, TIKA menjadi instrumen utama dalam diplomasi kemanusiaan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mendukung stabilitas dan pembangunan jangka panjang di negara-negara penerima (Beşgül 2024).

Turki secara konsisten menggunakan TIKA sebagai instrumen utama dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan dan memperluas pengaruh *soft power*-nya. TİKA berperan dalam menyalurkan bantuan pembangunan dan kerja sama teknis ke lebih dari 140 negara. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Turki, bantuan luar negeri yang disalurkan melalui TİKA semakin meningkat, serta memperkuat posisi Turki di dunia internasional. Dengan demikian, TİKA bukan sekadar lembaga bantuan, melainkan merupakan alat strategis dalam kebijakan luar negeri Turki. Keberadaan TİKA membantu Turki dalam menciptakan jaringan internasional yang lebih luas, meningkatkan daya tarik diplomasi budaya, serta memperkuat identitas Turki sebagai negara yang memiliki komitmen tinggi terhadap bantuan kemanusiaan global (Beşgül 2024).

Dalam melakukan upaya diplomasi kemanusiaan, TIKA menjadi lembaga kemanusiaan utama Turki dalam memberikan bantuan terhadap Rohingya. TIKA merupakan lembaga kemanusiaan Turki yang didirikan pada tahun 1992, yang

didirikan untuk memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara bekas republik Soviet yang baru merdeka di kawasan Asia Tengah. Organisasi ini bertugas untuk menjalankan dan mengelola proyek-proyek pembangunan, sekaligus menjadi salah satu alat utama diplomasi luar negeri Turki di kawasan Asia Tengah dan sekitarnya. Seiring dengan perkembangan kebijakan luar negeri Turki yang mengedepankan pendekatan politik aktif, TIKA berkembang menjadi perantara penting dalam melaksanakan berbagai agenda Turki di panggung internasional. Peran TIKA tidak hanya terbatas di Asia Tengah, tetapi juga telah menyebar ke seluruh dunia. Saat ini fokus TIKA yaitu membantu pelaksanaan program-program kemanusiaan seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, serta pengembangan kapasitas manusia di negara-negara yang membutuhkan bantuan (TIKA 2024a).

Dalam membantu etnis Rohinya, Turki menjalankan diplomasi melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalalah melalui diplomasi kemanusiaan TIKA. Sebagai lembaga yang berperan dalam bantuan pembangunan dan kemanusiaan, TIKA telah aktif dalam memberikan bantuan kepada komunitas Rohingya, baik di Myanmar maupun di kamp-kamp pengungsian, seperti di Bangladesh. Dalam konteks krisis Rohingya, TIKA tidak hanya menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan, tetapi juga berperan dalam membangun infrastruktur yang lebih berkelanjutan, seperti pusat kesehatan dan sekolah bagi para pengungsi. Selain itu, TIKA berfungsi sebagai instrumen soft power Turki yang memperkuat pendekatan diplomasinya. Melalui TIKA, Turki menunjukkan komitmennya dalam mendukung komunitas Rohingya dan mendorong penyelesaian yang lebih inklusif serta berkelanjutan bagi krisis tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini berfokus pada efektivitas peran TIKA dalam upaya diplomasi kemanusiaan terhadap konflik Rohingya. Salah satu aspek utama yang dikaji adalah sejauh mana bantuan yang disalurkan oleh TİKA memberikan dampak nyata bagi kondisi pengungsi Rohingya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi TİKA dalam menyalurkan bantuan, seperti hambatan politik dan administratif juga menjadi bagian dari analisis untuk memahami sejauh mana efektivitas program yang dijalankan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran TİKA dalam melakukan upaya diplomasi kemanusiaan dalam merespon konflik Rohingya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh *Turkish Cooperation and Coordination Agency* selaku lembaga kemanusiaan Turki terhadap etnis Rohingya di Myanmar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis konflik yang melibatkan etnis Rohingya serta dampak kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

2. Menganalisis upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh TIKA sebagai salah satu lembaga kemanusiaan Turki dalam menanggapi isu kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan TIKA dalam menangani krisis Rohingya selama periode 2012-2024. Dalam kurun waktu ini, terjadi eskalasi dan intensitas konflik di negara bagian Rakhine yang mengakibatkan gelombang kekerasan terhadap etnis Rohingya, termasuk peristiwa besar pada tahun 2012 dan puncaknya pada 2017, serta peristiwa kudeta militer pada tahun 2021. Peristiwa-peristiwa tersebut memicu migrasi massal ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand, Indonesia, dan Malaysia.

Penelitian ini juga akan meneliti pendekatan yang dilakukan oleh TIKA, seperti pemberian bantuan kemanusiaan, memonitoring bantuan agar tersalurkan secara efisien, serta memberikan dukungan terhadap inividu dan komunitas lokal Rohingya. Kemudian penelitian ini akan meninjau langkah-langkah negosiasi serta diplomasi yang dilakukan Turki dengan pemerintah Myanmar dan negara-negara tetangga termasuk Bangladesh, untuk memastikan akses bantuan dapat disalurkan ke negara-negara terdampak. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman tentang bagaimana Turki memanfaatkan TIKA sebagai alat dalam diplomasi kemanusiaan untuk menangani krisis Rohingya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Demi menjelaskan penelitian mengenai Diplomasi kemanusiaan TIKA dalam menanggapi isu kemanusiaan Rohingya tahun 2012-2024, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik, serta dapat menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Tom Finaldin dan Anisa Maulani yang mengkaji konflik antara etnis Rohingya dan etnis Buddha Rakhine di Myanmar, yang dimulai pada tahun 2012 dan dipicu oleh kekerasan antar etnis serta pelanggaran hak asasi manusia. Konflik ini menyebabkan Rohingya menjadi kelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan. Turki yang memiliki kesamaan dalam memeluk agama Islam dengan Rohingya, berperan aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan mengadvokasi isu Rohingya di forum internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme yang berpendapat bahwa identitas menentukan kepentingan dan tindakan yang akan dilakukan oleh negara. Dalam konteks ini, Turki melakukan perannya atas dasar pendekatan identitas yang sama yaitu Islam, yang mempengaruhi kepentingan dan tindakan Turki dalam membantu etnis Rohingya (Finaldin and Maulani 2023).

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ringgo Febriar yang membahas tentang kebijakan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Turki kepada etnis Rohingya, terutama setelah konflik komunal di Myanmar antara 2012 hingga 2015. Penelitian ini menyoroti peran identitas Turki sebagai negara Muslim dalam kebijakan luar negerinya, tetapi menunjukkan bahwa motivasi utama di balik bantuan tersebut lebih kompleks dan didasarkan pada faktor kemanusiaan. Jurnal ini menekankan bahwa upaya kemanusiaan Turki lebih didorong oleh nilai-nilai

moral universal daripada sekadar identitas agama, dan mencerminkan upaya Turki untuk membangun kembali pengaruhnya di kawasan serta menjalin hubungan baik dengan Myanmar (Febriar 2016).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Volkan Şeyşane dan Görkem Tanriverdi yang membahas mengenai perkembangan peran Turki dalam diplomasi kemanusiaan, khususnya dalam menanggapi krisis yang menimpa umat Muslim di Myanmar dan Somalia. Penelitian ini menguraikan pendekatan komprehensif Turki, yang ditandai dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan fokus pada bantuan secara langsung, pembangunan negara, dan advokasi untuk korban yang terdampak. Selain itu penelitian ini juga menyoroti integrasi upaya kemanusiaan Turki ke dalam kebijakan luar negerinya, yang menekankan keseimbangan antara tujuan kemanusiaan dan kepentingan politik, serta kontribusi signifikan negara ini terhadap upaya kemanusiaan global sejak awal tahun 2000-an. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan tentang bagaimana Turki muncul sebagai aktor penting dalam diplomasi kemanusiaan global. Dengan pendekatan yang pragmatis dan komprehensif, Turki tidak hanya memenuhi tanggung jawab moralnya tetapi juga meningkatkan pengaruh politiknya di panggung internasional (Şeyşane and Tanriverdi-Şeyşane 2022).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas krisis Rohingya, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek kemanusiaan, kondisi kamp pengungsian, serta kebijakan negara penerima seperti Bangladesh dan Indonesia. Meskipun tulisan di atas juga ada yang menyinggung mengenai peran Turki dalam diplomasi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, akan tetapi belum ada yang secara spesifik membahas mengenai pendekatan diplomasi kemanusiaan TIKA sebagai salah satu

terhadap etnis Rohingya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi upaya TIKA terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

1.6 Kerangka Pemikiran

Konsep *humanitarian diplomacy* atau diplomasi kemanusiaan menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana Turki Melalui Lembaga kemanusiaanya merespons konflik etnis yang dialami oleh Muslim Rohingya di Myanmar. Diplomasi kemanusiaan menurut Larry Minear dan Hazel Smith lebih menekankan bahwa diplomasi kemanusiaan dilakukan oleh lembaga kemanusiaan atau personel kemanusiaan (Minear and Hazel 2007, 1)

Menurut penjelasan Minear dan Smith dalam bukunya yang berjudul *"Humanitarian Diplomacy: Practitioner and their Craft",* diplomasi konvensional dan diplomasi kemanusiaan merupakan dua hal yang berbeda. Diplomasi konvensional dipahami sebagai upaya untuk mengedepankan kepentingan nasional suatu negara, sementara diplomasi kemanusiaan merupakan upaya dalam mengatasi penderitaan manusia dan memastikan akses terhadap bantuan kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan bersifat *ad hoc*, yaitu di mana tindakan yang dilakukan bersifat fleksibel dan kondisional sesuai dengan keadaan konflik yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dan dalam konteks wilayah tertentu. Sehingga diplomasi ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi, karena tindakan yang dilakukan dalam diplomasi kemanusiaan bergantung pada kondisi konflik sedang yang terjadi (Minear 2007).

Dalam bukunya, Smith mengatakan diplomasi kemanusiaan tidak terikat atau terhalang oleh batas kekuasaan suatu negara, diplomasi kemanusiaan biasanya

terkait dengan isu-isu kemanusiaan dan berfokus terhadap penyelamatan nyawa, perlindungan hak asasi manusia, dan penyediaan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, terutama dalam situasi krisis. Penjelasan diatas memperlihatkan bahwa diplomasi kemanusiaan hadir bukan sebagai advokat politik, melainkan sebagai negosiator politik (Smith 2007).

Diplomasi kemanusiaan tidak menggunakan ancaman atau kekerasan dalam mencapai tujuannya, penggunaan ancaman kekuatan atau *coercive diplomacy* dinilai tidak efisien dalam diplomasi kemanusiaan karena hal tersebut merupakan instrumen yang tumpul untuk mencapai tujuan dari diplomasi kemanusiaan. Melakukan intervensi kemanusiaan dengan menggunakan kekerasan dianggap sebagai kegagalan dalam diplomasi kemanusiaan, sementara diplomasi kemanusiaan dapat dikatakan berhasil jika tidak menggunakan kekerasan yang dapat merugikan serta mengancam kehidupan manusia (Smith 2007, 51). Penerapan diplomasi kemanusiaan berbeda dengan diplomasi tradisional, diplomasi kemanusiaan melibatkan aktivitas nyata yang secara langsung memberikan dampak bagi masyarakat sipil di negara yang membutuhkan bantuan. Dalam penerapannya, aktor negara melakukan aktivitas diplomasi kemanusiaan dengan melakukan pertemuan bilateral atau multilateral (Smith 2007, 54).

Dalam tulisan tersebut, Larry Minear juga mengidentifikasi beberapa aktivitas dalam melakukan proses diplomasi kemanusiaan, meliputi (Minear 2007, 11-14) :

1. Mengatur kehadiran organisasi kemanusiaan dan personel internasional : dalam hal ini berarti memastikan bahwa lembaga-lembaga kemanusiaan dan

tenaga ahli dapat beroperasi di negara atau wilayah tertentu untuk memberikan bantuan.

2. Negosiasi akses bantuan : Diplomasi kemanusiaan melibatkan upaya untuk memastikan bahwa bantuan dapat mencapai penduduk sipil yang membutuhkan, terutama di daerah konflik atau bencana. Ini mencakup negosiasi dengan berbagai pihak yang terlibat untuk mendapatkan izin dan memastikan keamanan bagi pekerja kemanusiaan.
3. Monitoring bantuan secara efektif dan efisien : Setelah akses diperoleh, penting untuk mendistribusikan bantuan dengan cara yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik, logistik yang efisien, dan pemahaman mendalam tentang situasi di lapangan.
4. Mempromosikan penghormatan terhadap hukum internasional : Hal ini berkaitan dengan upaya menegakkan prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional, seperti perlindungan terhadap pengungsi dan warga sipil dalam konflik.
5. Mendukung individu dan institusi lokal : Pendekatan ini menekankan bahwa bantuan kemanusiaan tidak hanya berfokus pada intervensi eksternal dari aktor internasional, tetapi juga pada pemberdayaan individu dan institusi lokal agar mereka dapat berperan aktif dalam menangani krisis di lingkungan mereka sendiri.

Dalam penelitian ini, analisis terhadap diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh TIKA akan dilihat hanya dari tiga aspek seperti negosiasi akses bantuan, monitoring bantuan, serta mendukung individu dan komunitas lokal. Hal ini dikarenakan peran utama TIKA dalam diplomasi kemanusiaan Turki lebih berfokus

pada pemberian bantuan langsung, fasilitasi akses bantuan, serta penguatan kapasitas lokal dibandingkan dengan aspek lain seperti advokasi politik atau promosi norma hukum internasional secara langsung. Sebagai lembaga yang berorientasi pada implementasi program pembangunan dan bantuan kemanusiaan, TİKA lebih banyak terlibat dalam memastikan akses bantuan bagi komunitas Rohingya melalui kerja sama dengan pemerintah Bangladesh dan organisasi lokal. Hal ini terlihat dari berbagai program yang dijalankan, seperti pembangunan pusat layanan kesehatan, distribusi bantuan pangan dan medis, serta penyediaan fasilitas pendidikan bagi pengungsi Rohingya.

1.7 Argumen Sementara

TIKA telah memainkan peran aktif dalam diplomasi kemanusiaan terhadap krisis Rohingya, yang semakin memburuk sejak 2012 dan mencapai puncaknya pada 2017 dengan eksodus besar-besaran ke Bangladesh akibat kekerasan militer Myanmar. Berdasarkan konsep diplomasi kemanusiaan menurut Larry Minear dan Hazel Smith, TIKA telah melakukan beberapa upaya terhadap etnis Rohingya meliputi, pemberikan bantuan langsung berupa makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan bagi pengungsi Rohingya di Myanmar dan Bangladesh. TIKA juga melakukan pemantauan terhadap bantuan yang telah diberikan agar dapat tersalurkan secara efisien dan tepat sasaran bagi etnis Rohingya. Selain itu, TIKA juga memberikan dukungan terhadap masyarakat dan komunitas lokal Rohingya agar dapat memperkuat kapasitas komunitas lokal dan lembaga yang ada di dalam suatu negara atau wilayah yang terdampak krisis. Dengan kombinasi bantuan

kemanusiaan, diplomasi kemanusiaan TIKA berupaya memperjuangkan hak-hak Rohingya serta meringankan penderitaan yang dialami oleh etnis Rohingya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berbasis data sekunder. Creswell mengatakan pendekatan kualitatif merupakan suatu proses pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran lengkap tentang fenomena yang dikaji (Murdiyanto 2020).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penulis mendapatkan subjek dan objek dalam penelitian ini, subjek dalam penelitian ini adalah lembaga kemanusiaan TIKA. Kemudian objek dari penelitian ini adalah bantuan yang diberikan TIKA dalam upaya melakukan diplomasi kemanusiaan untuk menanggapi konflik etnis yang terjadi terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berfokus pada pengumpulan data sekunder, sumber dari pengumpulan yaitu menggunakan jurnal ilmiah, artikel ilmiah, buku, dan berita aktual. Metode ini dipilih penulis karena sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang tidak memerlukan perhitungan angka.

1.8.4 Proses Penelitian

Penulis melakukan proses pengerjaan penelitian dengan cara pengumpulan data dari jurnal ilmiah, artikel ilmiah, buku, dan berita aktual dengan tujuan agar dapat memahami studi kasus yang akan dibahas penulis di bab selanjutnya.

1.9 Sistematika Pembahasan

a. Bab 1:

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah terkait kasus yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argument semetara, dan metode penelitian.

b. Bab 2:

Pada bab ini penulis akan memaparkan kondisi etnis Rohingya di negara Myanmar, kemudian penulis juga akan memaparkan dampak yang diberikan konflik kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, serta motivasi Turki dalam menanggapi isu kemanusiaan yang menimpa etnis Muslim Rohingya di Myanmar.

c. Bab 3:

Pada bab ini penulis akan memaparkan menjelaskan hasil penelitian mengenai upaya diplomasi kemanusiaan Turki yang dilakukan oleh TIKA dalam merespon konflik etnis yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar.

d. Bab 4:

Pada bab terakhir penulis akan merangkum semua data yang telah diolah agar dapat menjadi saran dan kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan serta dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB 2

SEJARAH DAN KONDISI KEMANUSIAAN ETNIS ROHINGYA

2.1 Keadaan Etnis Rohingya di Myanmar

Etnis Rohingya, yang sebagian besar beragama Islam, telah lama menjadi kelompok minoritas yang terpinggirkan di Myanmar, khususnya di negara bagian Rakhine. Dalam beberapa dekade terakhir, mereka menghadapi berbagai tantangan yang semakin memperburuk keadaan mereka, termasuk diskriminasi sistematis, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketiadaan status kewarganegaraan. Ketiadaan pengakuan sebagai warga negara Myanmar telah menjadikan Rohingya sebagai kelompok *stateless*, yang mengakibatkan hilangnya akses-akses terhadap layanan dasar. Situasi ini tidak hanya menciptakan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memperburuk ketegangan sosial antara Rohingya dan etnis mayoritas Buddha di Myanmar (Merici Siba and Nurul Qomari'ah 2018).

Seperti yang dilansir dalam laporan Amnesty Internasional, situasi masyarakat etnis Rohingya di Myanmar semakin memburuk sejak Agustus 2017 ketika militer melakukan aksi kekerasan massal terhadap etnis Rohingya yang tinggal di wilayah utara Negara Bagian Rakhine. Hingga saat ini tercatat lebih dari 600.000 masyarakat Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Sejak peristiwa kekerasan yang terjadi di Myanmar pada tahun 2012, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Myanmar adalah melakukan diskriminasi dan segregasi terhadap etnis Rohingya dan komunitas Muslim lain yang berada di Negara Bagian Rakhine. Pembatasan-pembatasan yang telah diberlakukan semakin diperketat dengan kebijakan diskriminasi dan segregasi, hampir semua aspek kehidupan masyarakat

etnis Muslim Rohingya dibatasi dan hak-hak mereka dilanggar secara rutin oleh pemerintah Myanmar (Amnesty International 2017).

Kondisi yang dialami warga Rohingya di Myanmar mencerminkan bentuk diskriminasi sistematis yang berbasis pada ras dan agama. Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 menjadi akar masalah dalam konflik ini, karena secara sengaja mengecualikan Rohingya dari daftar "ras nasional" yang diakui di negara Myanmar. Akibatnya, mereka kehilangan status kewarganegaraan dan menjadikan mereka kelompok tanpa negara atau *stateless* (Amnesty International 2017).

2.1.1 Asal Usul dan Sejarah Konflik Etnis Rohingya

Orang Rohingya berbicara dalam bahasa Rohingya atau Ruaingga, yang memiliki kemiripan dengan dialek Chittagonian yang digunakan di Bangladesh. Bahasa ini berbeda dari yang digunakan di Negara Bagian Rakhine dan di seluruh Myanmar. Bahasa Rohingya juga memiliki pengaruh dari berbagai bahasa lain, seperti Urdu, Hindi, Arab, Bama (Burma), dan Inggris, yang mencerminkan sejarah interaksi dan migrasi mereka. Secara fisik, orang Rohingya memiliki kemiripan dengan penduduk Chittagong, Bangladesh. Mayoritas dari mereka tinggal di Negara Bagian Rakhine, yang terletak di pesisir barat Myanmar (Mohajan 2018).

Terdapat perdebatan mengenai asal-usul dari etnis Rohingya, Francis Buchanan seorang dokter dan ahli geografi Inggris menyatakan dalam artikel yang terbit pada tahun 1799 bahwa penduduk asli Arakan adalah *"Yakein"* atau *"Rooinga",* Buchanan mengidentifikasi dua komunitas utama yang menetap di Arakan. Komunitas pertama yaitu orang Islam yang telah lama menetap di Arakan dan menyebut diri mereka Rooinga (penduduk asli Arakan), dan komunitas lainnya adalah Rakhing yaitu orang-orang yang menganut agama Buddha. Penamaan

kelompok ini tidak hanya membuktikan bahwa ada minoritas Muslim yang lebih dulu menetap di wilayah Arakan, tetapi juga membedakan mereka dari mayoritas penduduk Arakan yang beragama Buddha (Ibrahim 2016).

Aye Chan, seorang sejarawan asal Myanmar, berpendapat bahwa istilah "Rohingya" pertama kali digunakan oleh komunitas Bengali yang tinggal di Arakan pada tahun 1950-an (Chan 2005). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pemerintah Myanmar dan sebagian besar sejarawan Burma yang menganggap Rohingya sebagai imigran Muslim Bengali yang bermigrasi ke Rakhine selama era kolonial Inggris. Mereka meyakini bahwa kehadiran Rohingya di Myanmar bukan berasal dari sejarah yang panjang, melainkan akibat gelombang migrasi dari Benggala saat Myanmar berada di bawah kekuasaan Inggris. Sementara itu, Benedict Rogers, seorang aktivis hak asasi manusia, mencatat bahwa banyak masyarakat Myanmar percaya bahwa Rohingya mulai masuk ke wilayah Myanmar secara ilegal sejak abad ke-19, terutama dari wilayah yang kini menjadi Bangladesh (Mohajan 2018).

Negara bagian Arakan yang sekarang dikenal dengan Rakhine merupakan wilayah yang bersejarah bagi etnis Muslim Rohingya. Ajaran Islam datang ke wilayah Arakan melalui hubungan perdagangan dari India dan Arab. Moshe Yegar dalam bukunya yang berjudul "*The Muslims of Burma"* mengatakan bahwa nenek moyang dari etnis Rohingya merupakan pedagang Arab dan Persia yang datang dan membangun pemukiman di wilayah Arakan dan Burma (Myanmar) sejak abad ke-7 Masehi (Ibrahim 2016).

Dari abad 9 hingga abad ke-12 Masehi terjadi ekspansi perdagangan di sepanjang wilayah pesisir Asia Selatan dan Asia Tenggara, dengan pusatnya di

wilayah Benggala. Dari Benggala mereka melanjutkan perdagangan ke wilayah Burma (Myanmar), Malabar, Ceylon, dan Malaka. Sebelum Inggris melakukan invasi di Burma, wilayah Arakan bukan merupakan bagian dari wilayah negara Burma (Myanmar), melainkan suatu kerajaan yang merdeka dengan nama Mrauk U atau Mrohaung, yang merupakan nama kuno dari Arakan (Farzana 2017).

Dinasti Mrauk-U menguasai wilayah Arakan yang memiliki multi-etnis (Chin, Rakhine, Rohingya) dan multi-agama (Hindu, Islam, dan Buddha). Saat itu Islam telah menjadi agama yang signifikan dan dominan di wilayah tersebut, bahkan ketika etnis Rakhine tetap mempertahankan identitas Buddha mereka. Rohingya merupakan bagian penting dari berbagai etnis di Arakan, laporan-laporan Inggris pada abad ke-19 menyebutkan bahwa umat Muslim setempat menyebut diri mereka sebagai *"Rovingaw"* atau *"Rooinga"* (Ibrahim 2016).

Invasi negara asing pada tahun 1406 mengawali terciptanya hubungan baik antara etnis Arakan dan Benggala Muslim, peristiwa tersebut melibatkan penguasa kerajaan Mrauk U yaitu Meng Soamwun yang meminta perlindungan kepada penguasa dari Benggala saat itu, yaitu Sultan Bengal Ghiyasuddin Azam Shah. Setelah kejadian tersebut hubungan antara etnis Muslim (Benggala) dan kerajaan Mrauk U (Arakan) semakin harmonis. Pengaruh Muslim semakin dominan di wilayah Arakan, sehingga raja-raja Arakan yang beragama Buddha sekalipun, menerapkan ajaran-ajaran Islam di wilayah mereka dan menggunakan nama Islam sebagai tambahan dari nama-nama mereka sebelumnya. Pada abad ke-15 hingga abad ke-17 hubungan antara umat Muslim dan kerajaan Mrauk-U semakin baik dan harmonis (Farzana 2017).

Dominasi etnis Rohingya dan ajaran Islam di Arakan berakhir sejak kedatangan etnis Rakhine yang menganut agama Budha dari Burma tengah sekitar tahun 1000 Masehi. Akhir abad ke-17 tepatnya pada tahun 1784 merupakan awal mula terjadinya perselisihan antara Arakan dan Burma, ketika Raja Burma saat itu yang bernama Bodawpaya menaklukkan serta menjadikan Arakan sebagai bagian dari wilayah kerajaan Burma. Perselisihan di wilayah tersebut semakin memanas setelah Burma menginvasi wilayah tersebut dan penduduk Arakan melawan penindasan Burma (Farzana 2017).

Dalam bukunya yang berjudul "*History of Burma",* G.E. Harvey mengatakan orang-orang yang tidak mampu membayar pajak akan dikumpulkan di garnisun yang kemudian akan dieksekusi oleh penguasa kerajaan Burma. Selain itu Raja Burma juga menerapkan sistem kerja paksa kepada etnis Arakan, sehingga menyebabkan mereka melarikan diri ke wilayah kolonial Inggris yang bersebelahan dengan Benggala. Oleh karena hal tersebut, hubungan baik antara negara bagian Arakan dan kerajaan Burma memburuk sehingga terjadi permusuhan dan rasa saling tidak percaya satu sama lain (Farzana 2017).

Kekaisaran Inggris mulai menjajah Burma pada tahun 1824, bertepatan dengan awal mula konflik antara etnis Arakan dan kerajaan Burma. Melalui serangkaian perang, Inggris berhasil mencaplok wilayah Arakan dan menjadikan Arakan sebagai zona penyangga untuk menginvasi daratan Burma. Inggris melindungi etnis Arakan dari penindasan Burma, oleh karena hal tersebut etnis Arakan memberikan dukungan kepada kolonial Inggris dalam menginvasi Burma. Kemudian Inggris memisahkan kelompok-kelompok minoritas dan membaginya

secara artifisial, kebijakan Inggris inilah yang memulai terjadinya ketegangan antar etnis dan komunitas yang berbeda selama era kolonial (Ibrahim 2016).

Setelah Inggris berhasil menaklukkan seluruh wilayah Burma pada tahun 1880, Arakan kembali menjadi bagian dari kerajaan Burma. Ketika Burma berada di bawah kekuasaan Inggris para penganut Budha merasa tidak didukung dan tersingkirkan, sentimen anti-Budha menjadikan Inggris lebih memilih memberikan posisi administratif kepada etnis-etnis yang tidak menganut agama Budha, salah satunya yaitu Rohingya. Preferensi Inggris untuk mempekerjakan orang yang tidak menganut agama Budha dalam struktur pemerintahan dan administrasi semakin memperparah situasi, sehingga menyebabkan perasaan anti-Inggris tercipta di kalangan umat Budha terutama etnis Burma, sementara itu etnis Rohingya, etnis Karen, dan kelompok minoritas lainnya bergabung dengan kolonial Inggris untuk melawan negara Burma (Ibrahim 2016).

Keadaan semakin memanas selama Perang Dunia II, ketika Jepang menginvasi Burma dan berhasil memukul mundur Inggris. Kaum nasionalis Burma mendukung dan menyambut kedatangan Jepang, sementara etnis Rohingya dan etnis minoritas lainnya tetap pro-Inggris mengingat dukungan yang diterima selama era kolonial. Hal ini menyebabkan perselisihan yang semakin memanas antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine. Konsekuensi dari konflik antar etnis menyebabkan pemisahan etnis antara wilayah Burma bagian utara yang sebagian besar Muslim dan wilayah Burma bagian selatan yang mayoritas beragama Budha. Sementara itu, Inggris mempersenjatai etnis Rohingya dan menjanjikan kemerdekaan bagi umat Islam di Arakan bagian utara, serta menjanjikan pembentukan wilayah nasional

Muslim sebagai imbalan atas kontribusi mereka dalam perang, akan tetapi Inggris mengingkari janji tersebut (Ibrahim 2016).

Setelah Inggris mengingkari janjinya, etnis Rohingya membentuk pasukan tentara untuk mengupayakan penggabungan wilayah Arakan utara ke dalam Pakistan timur, yang sekarang dikenal sebagai Bangladesh. Inisiatif ini tidak berhasil, akan tetapi setelah Burma mencapai kemerdekaan pada tahun 1948, masyarakat Muslim Arakan mengajukan petisi ke Majelis Konstituante di Rangoon untuk mengintegrasikan distrik Maungdaw dan Buthidaung ke dalam Pakistan Timur. Hal ini membuat pihak berwenang Burma menganggap penduduk Muslim di Arakan memusuhi rezim baru dan menaruh kesetiaannya pada negara lain (Ibrahim 2016).

Kondisi konflik etnis Rohingya semakin memburuk, setelah terjadi kudeta militer pada Februari 2021. Militer Myanmar menahan para petinggi pemerintahan yang terpilih secara demokratis, termasuk kepala negara de facto yaitu Aung San Suu Kyi. Setelah berhasil menggulingkan pemerintahan, pemimpin junta militer Jenderal Min Aung Hlaing memberlakukan keadaan darurat selama setahun. Peristiwa kudeta ini memicu protes besar-besaran di ibu kota Naypyitaw, dengan tuntutan pemulihan pemerintahan sipil. Pasukan keamanan menanggapi aksi tersebut dengan kekerasan, sehingga menewaskan lebih dari enam ratus pengunjuk rasa tewas sejak aksi protes dimulai. Kudeta ini mengakibatkan ekonomi menurun drastis, hal ini semakin memperparah ketidakmampuan etnis minoritas dalam mengakses layanan dan kebutuhan dasar. Selain itu, rezim militer yang berkuasa saat ini merupakan rezim yang melakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingnya pada tahun 2017 (Center of Preventive Action 2024).

Meningkatnya serangan terhadap warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine menunjukkan pola kekejaman yang sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Agustus 2017, ketika militer Myanmar melancarkan operasi brutal terhadap komunitas Rohingya. Serangan pada 2017 erat dengan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa-desa. Menurut data dari *Medecins Sans Frontieres* (MSF), serangan pada 2017 memakan korban sebanyak 6.700 jiwa, dengan 730 diantaranya adalah anak-anak, hal ini kemudian menyebabkan 688.000 jiwa masyarakat etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh (MSF 2023).

Peneliti dari *Amnesty International* Joe Freeman, mengatakan situasi mengerikan di Negara Bagian Rakhine terlihat sangat mirip dengan serangan yang terjadi pada tahun 2017. Pria, wanita, dan anak-anak Rohingya dibunuh, kota-kota dikosongkan, dan sisa-sisa sejarah serta identitas Rohingya terkikis. Banyak orang yang mencari perlindungan ke kamp-kamp pengungsi di seberang perbatasan Bangladesh (Amnesty International 2024).

Setelah menjadi sasaran kekerasan dan penganiayaan pada bulan Agustus 2017, masyarakat etnis Rohingya kini terjebak di tengah-tengah konflik antara *Arakan Army* (AA) dan Junta Myanmar, yang secara paksa mewajibkan warga Rohingya untuk bertempur di pihaknya. Junta Myanmar meluncurkan serangan udara yang menewaskan etnis Rohingya serta warga sipil etnis Rakhine. Mereka menargetkan daerah-daerah sipil, menghancurkan rumah-rumah, pasar, dan infrastruktur sipil lainnya. Kemudian pada 17 Mei, AA melakukan serangan besar-besaran yang menyebabkan ribuan penduduk Rohingya mengungsi. Kemudian pada 5 Agustus AA melakukan serangan balik yang menewaskan sejumlah warga

sipil yang melarikan diri dari kota Maungdaw di dekat perbatasan Bangladesh (Amnesty International 2024).

Berdasarkan data dari PBB, sebanyak 15 kota dari 17 kota di Rakhine telah terdampak konflik, serta mengakibatkan ratusan jiwa korban meninggal, dan sekitar 327.000 orang masyarakat negara bagian Rakhine dan kota Pallewa mengungsi ke negara bagian Chin sejak gencatan senjata yang disepakati oleh kedua belah pihak gagal pada November 2023. Ditambah dengan kelompok yang telah mengungsi sebelumnya, jumlah total pengungsi di negara bagian Chin mencapai lebih dari 534.000 orang (MSF 2024).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkhawatirkan akan terulangnya kembali kekejaman pada tahun 2017 yang dilakukan terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk menyatakan keprihatinannya mengenai situasi Myanmar yang semakin memburuk terutama di Rakhine, yang dimana ratusan warga sipil dilaporkan telah terbunuh ketika mencoba melarikan diri dari pertempuran. Turki meminta kedua belah pihak untuk menghentikan serangan terhadap warga sipil, serta mendesak ASEAN untuk mengambil langkah-langkah dalam melindungi Rohingya (Agence France-Presse 2024).

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kepada semua pihak untuk mengakhiri kekerasan dan memastikan perlindungan warga sipil. Sekretaris Jenderal PBB juga mendesak upaya perlindungan regional untuk memberikan akses kepada masyarakat yang terkena dampak konflik, serta memberikan dukungan lebih lanjut kepada negara-negara tuan rumah, terutama di Bangladesh. Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan bahwa junta dan AA telah melakukan pelanggaran

hak asasi manusia yang serius terhadap Rohingya, yaitu pembunuhan, penculikan, perekrutan paksa, pengeboman tanpa pandang bulu di kota-kota dan desa-desa, dan serangan pembakaran (Agence France-Presse 2024).

2.1.2 Ketiadaan Status Kewarganegaraan yang Memperburuk Konflik

Penolakan pemberian status kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar mengakibatkan kehidupan Rohingya terus mengalami keterpurukan, sehingga menjadikan etnis Rohingya tidak berada dalam perlindungan negara, yang mengakibatkan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seperti penyiksaan dan pembunuhan terjadi (Budaya 2017). Pada masa rezim Jendral Ne Win (1962-1974) hingga tahun 2000, etnis Rohingya mengalami diskriminasi yang sangat berat, yaitu kebijakan *Burmanisasi.* Kebijakan ini merupakan tindakan marginalisasi masyarakat Muslim Rohingya, kebijakan ini terbentuk pada tahun 1982 atau yang disebut dengan *Burma Citizenship Law* (Merici Siba and Nurul Qomari'ah 2018).

Kebijakan ini tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi, sehingga mereka menjadi *stateless*, yang berarti mereka tidak diakui sebagai warga negara oleh Myanmar maupun negara lain. Kondisi ini membuat mereka kehilangan hak-hak dasar seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Mereka juga menghadapi pembatasan kebebasan bergerak, terutama di kamp-kamp pengungsi internal di Myanmar, yang memperparah marginalisasi mereka. Tanpa adanya status kewarganegaraan menjadikan etnis Rohingya kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk eksploitasi, perdagangan manusia, pengusiran paksa, dan genosida. Selain itu, ketiadaan dokumen resmi menghambat mereka dalam mencari

perlindungan di negara lain, sehingga memperburuk situasi yang sudah kompleks dan sulit diatasi (Ichikaya Mitzy 2017).

Pemerintah Myanmar telah berkali-kali mengeluarkan kebijakan yang mengarah ke pelanggaran HAM berat, yang bertujuan untuk mengusir etnis Rohingya keluar dari negara Myanmar. Sikap dari pemerintah Myanmar yang menolak etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negaranya diyakini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan konflik berkepanjangan di negara tersebut. Karena hal tersebut, masyarakat etnis Rohingya telah kehilangan hak dasar sebagai warga negara seperti hak memiliki dan mendapat tempat tinggal, kesejahteraan, serta pekerjaan (Budaya 2017).

Kehidupan bermasyarakat bagi etnis Rohingya sangat dibatasi oleh berbagai aturan diskriminatif yang diberlakukan di Myanmar. Mereka menghadapi pembatasan ketat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk menikah, berpindah tempat tinggal, dan mencari pekerjaan, semuanya memerlukan izin khusus yang sering kali hanya dapat diperoleh dengan membayar biaya tinggi. Selain itu, pemerintah Myanmar juga membatasi jumlah anak yang boleh dimiliki oleh setiap keluarga Rohingya maksimal dua orang anak, bahkan, anak-anak yang lahir tidak diberikan sertifikat kelahiran (Merici Siba and Nurul Qomari'ah 2018).

Situasi ini semakin diperburuk oleh kebijakan diskriminatif di Negara Bagian Rakhine, seperti inspeksi rumah tangga wajib dan penghapusan nama mereka dari catatan resmi, yang menciptakan hambatan administratif yang sangat sulit diatasi. Kehilangan dokumen identitas penting memperburuk peluang generasi muda Rohingya untuk mendapatkan kewarganegaraan di masa depan, sementara

bayi yang tidak terdaftar sejak lahir menghadapi tantangan besar dalam mengakses hak-hak mereka (Amnesty International 2017).

Kebijakan tersebut juga telah menyebabkan anak-anak Rohingya kehilangan hak serta akses dalam hal pendidikan dan kesehatan. Kemudian pemerintah Myanmar menarik akses dari “kartu putih”, yang dimana kartu tersebut merupakan satu-satunya identitas resmi etnis Rohingya. Kartu tersebut diberikan kepada masyarakat Rohingya yang tinggal di Myanmar, tetapi tidak mendapatkan status resmi dalam asosiasi, penduduk asing, ataupun penduduk lokal. Pemegang kartu putih dapat diartikan bahwa mereka bukanlah warga negara asing atau warga negara Myanmar. Dengan ditariknya kartu tersebut, menjadikan masyarakat Rohingya kehilangan hak untuk mengikuti pemilihan umum (Budaya 2017).

Selain itu, masyarakat etnis Rohingya yang meninggalkan Myanmar akibat kekerasan atau untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negara, hampir tidak memiliki kesempatan untuk kembali karena kebijakan pemerintah yang membatasi hak mereka untuk pulang. Dehumanisasi melalui penggambaran mereka sebagai "bukan bagian dari ras nasional" turut menciptakan polarisasi sosial antara Rohingya dan kelompok lain di Myanmar, yang pada akhirnya memicu kekerasan dan pengusiran massal (Amnesty International 2017).

Laporan dari UNHCR menunjukkan bahwa ribuan pengungsi Rohingya telah berupaya melarikan diri melalui jalur laut setiap tahun, terutama menuju negara-negara seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Akan tetapi, banyak dari mereka yang tidak selamat dalam perjalanan atau dipulangkan secara paksa oleh otoritas negara yang mereka tuju, dikarenakan status kewarganegaraan mereka yang tidak diakui. Perjalanan berbahaya ini mencerminkan putus asanya

para pengungsi dalam mencari tempat yang aman di tengah kurangnya alternatif legal untuk melarikan diri dari penindasan dan kekerasan yang mereka alami di Myanmar (UNHCR 2023a).

Kondisi ini menciptakan siklus kerentanan yang sulit dipecahkan dan menjadikan mereka kelompok yang rentan terhadap konflik dan diskriminasi. Tidak adanya status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya semakin memperburuk situasi mereka ketika mencoba mencari perlindungan di negara lain. Banyak dari mereka yang tidak memiliki dokumen resmi seperti paspor atau sertifikat identitas, yang diperlukan untuk mengajukan permohonan suaka atau status pengungsi. Hal ini membuat perjalanan melintasi perbatasan menjadi ilegal di mata hukum internasional. Ketiadaan dokumen juga memperumit proses administrasi di negara-negara penerima pengungsi, yang sering kali ragu untuk menerima mereka tanpa bukti identitas yang valid. Akibatnya, banyak masyarakat Rohingya yang terjebak dalam situasi tidak diterima di negara asal maupun negara tujuan mereka.

2.2 Dampak Konflik Terhadap Kondisi Kemanusiaan Etnis Rohingya

Konflik etnis yang terjadi antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya telah menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam hak asasi manusia seperti pembunuhan, pembakaran rumah, dan tidak diakui status kewarganegaraannya. HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah. Hak ini bersifat universal**,** tidak dapat dicabut**,** dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, gender, atau status sosial. Namun, sering kali pelanggaran HAM terjadi karena berbagai faktor, seperti konflik, diskriminasi, ketidakadilan hukum, atau tindakan otoritas tertentu.

Salah satu contoh nyatanya adalah nasib etnis Rohingya di Myanmar, di mana hak-hak dasar mereka, seperti hak atas kewarganegaraan, keamanan, dan kebebasan, dirampas (Merici Siba and Nurul Qomari'ah 2018).

Rome Statute of The International Criminal Court 1998 merupakan Statuta Mahkamah Kejahatan Internasional yang ditandatangani di Roma pada 17 Juli 1998, dalam perjanjian tersebut dijelaskan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Susanti 2014). Pemerintah Myanmar menerapkan kebijakan *Burmanisasi* yang hanya mengakui agama Buddha sebagai agama resmi di negara tersebut. Kebijakan ini menyebabkan etnis Rohingya kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Akibatnya, banyak dari mereka terpaksa mengungsi ke negara-negara lain, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Bangladesh, demi mencari perlindungan (Merici Siba and Nurul Qomari'ah 2018).

Tabel 2.1 Pelanggaran HAM yang Dialami Etnis Rohingya

No	Tahun	Keterangan
1.	2012	Merupakan puncak konflik yang menyebabkan 125.000 warga etnis Rohingya dan komunitas Muslim lainnya melarikan diri ke kamp pengungsian di Myanmar bagian Barat. Kekerasan pertama terjadi pada bulan Juni, dalam kampanye pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya di Rakhine. Pada bulan Oktober kekerasan lebih terorganisir, dengan pasukan bersenjata Rakhine menyerang desa-desa Muslim. Insiden ini menewaskan 70 orang dari etnis Rohingya. Kerusakan bangunan di Rakhine sejak konflik bulan Juni 2012, mencapai 4.862 bangunan atau sekitar 348

		hektar yang merupakan properti perumahan di Rakhine rusak parah (HRW 2013a).
2.	2013	Pemerintah Myanmar menerapkan kebijakan diskriminatif yang membatasi Muslim Rohingya untuk memiliki maksimal dua anak. Selain itu, pasangan Rohingya yang ingin menikah harus mendapatkan izin dari pemerintah dengan membayar suap dalam jumlah besar (HRW 2013b). ika pihak berwenang (Na Sa Ka) menemukan pelanggaran terhadap aturan ini, keluarga yang bersangkutan akan dimasukkan ke daftar hitam pemerintah. Akibat pembatasan ini, sekitar 60.000 anak Rohingya tidak terdaftar secara resmi. Pada Juni 2013, ratusan warga etnis Budha Rakhine melakukan unjuk rasa menuntut agar aturan pembatasan dua anak bagi Muslim Rohingya tetap diberlakukan (HRW 2013c).
3.	2014	Pada tahun ini sebanyak 63.000 orang melakukan perjalanan berbahaya dan tidak resmi menggunakan perahu di Teluk Bengal dan Laut Andaman. Perjalanan dengan perahu ini diatur oleh jaringan terorganisir pelaku penyelundupan dan perdagangan manusia. Pelapor Khusus PBB tentang Situasi HAM di Myanmar mengatakan bahwa pelanggaran HAM di Myanmar telah menghasilkan sejumlah besar pencari suaka serta mendorong penyelundupan dan perdagangan manusia. Sejak 2014 hingga pertengahan tahun 2015 diperkirakan lebih dari 1.100 orang tewas di Teluk Bengal dan Laut Andaman (Amnesty International 2015).
4.	2015	Pada 1 April 2015, pemerintah Myanmar mencabut kartu identitas sementara (kartu putih), sehingga mengakibatkan puluhan ribu warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Indonesia, Malaysia, dan Thailand dengan menggunakan jasa penyelundup manusia. Dalam tiga bulan pertama di

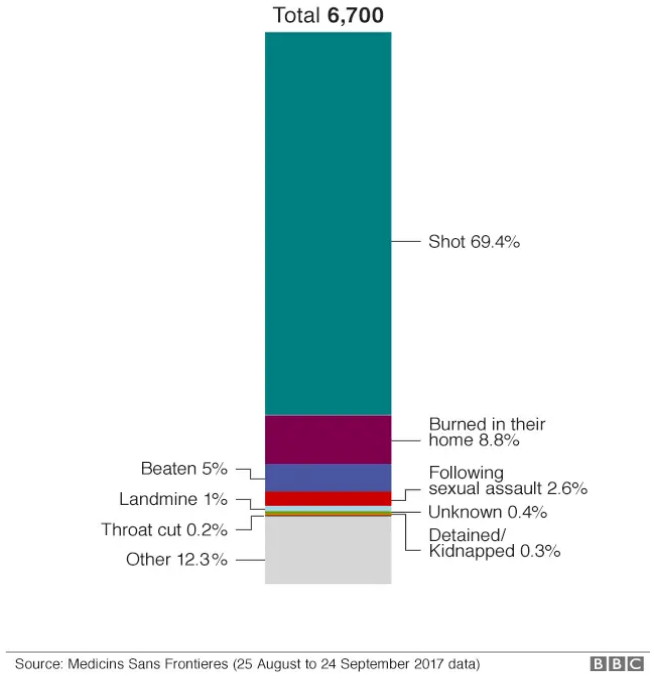
		tahun 2015, sekitar 28.500 warga Rohingya melarikan diri dengan perahu, menurut laporan dari UNHCR diperkirakan 300 orang telah meninggal di laut dari bulan Januari hingga Maret (HRW 2015).
5.	2016	Setelah serangan yang dilakukan Kelompok bersenjata Rohingya (ARSA) pada 9 Oktober 2016, pasukan militer Myanmar (*Tatmadaw*) melancarkan "operasi pembersihan" di Maungdaw. Militer Myanmar bersama polisi dan masyarakat Myanmar melakukan kekerasan besar-besaran terhadap etnis Rohingya, dalam serangan ini banyak desa dibakar, warga disiksa, diperkosa, dan dibunuh. Gelombang kekerasan ini berlangsung hingga awal 2017, dan menyebabkan sekitar 87.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh (International Criminal Court 2019)
6.	2017	Pada 25 Agustus 2017, terjadi kekerasan gelombang kedua yang merupakan operasi lanjutan dari kekerasan gelombang pertama pada tahun 2016. Operasi serangan ini mencakup penghancuran ratusan desa etnis Rohingya, pembunuhan sekitar 10.000 orang etnis Rohingya, pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya, serta menyebabkan banyak orang terluka parah. Operasi ini menyebabkan lebih dari 700.000 Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh (International Criminal Court 2019).
7.	2018	Amnesty Internasional melaporkan bahwa pembersihan etnis yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis minoritas, terutama Rohingya masih terus berlangsung hingga tahun 2018. Laporan tersebut menyatakan bahwa pihak berwenang melakukan pencurian sistematis, menahan makanan, serta menjadikan perempuan dan anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

Pengungsi Rohingya di Thailand, Malaysia, dan Indonesia kerap mengalami kekerasan dan menjadi korban perdagangan manusia. Pada Mei 2015, pihak

berwenang Thailand menemukan para penyintas dalam kondisi mengenaskan di kamp perdagangan manusia dekat perbatasan Malaysia. Banyak pengungsi diperdagangkan, ditahan, disiksa, dan meninggal akibat kelaparan, penyakit, atau pemukulan saat menunggu tebusan dari keluarga. Sebagai respon, Perdana Menteri Thailand memerintahkan penghancuran kamp-kamp tersebut. Di Malaysia, pihak berwenang Malaysia juga menemukan kamp serupa di perbatasan utara, dengan 139 kuburan berisi jenazah migran, termasuk Rohingya. Selain itu, 12 petugas polisi Malaysia ditangkap karena diduga terlibat dalam perdagangan manusia (Amnesty International 2015).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh MSF di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh, memperkirakan sebanyak 6.700 warga Rohingya meninggal di negara bagian Rakhine antara tanggal 25 Agustus dan 24 September 2017 (MSF 2017).

Diagram 2.1 Jumlah Kekerasan yang Dialami Etnis Rohingya

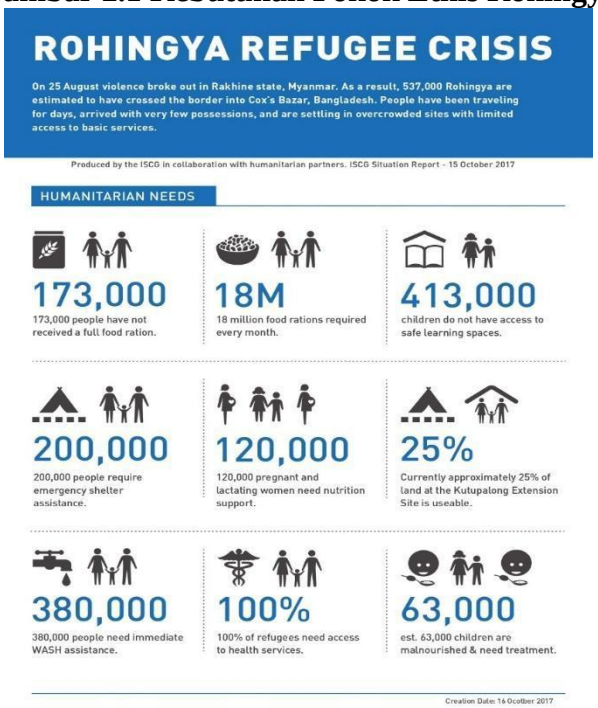


Sumber: Médecins Sans Frontières (BBC 2017)

Diagram diatas menunjukkan penyebab kematian yang dialami oleh etnis Rohingya selama periode kekerasan gelombang kedua pada tahun 2017. Dari total 6.700 korban jiwa**,** sebagian besar meninggal akibat ditembak, terdapat korban yang dibakar hidup-hidup di rumah mereka**,** dipukul hingga tewas, terkena ranjau darat, dan sebagian kecil korban juga meninggal akibat serangan seksual yang berujung pada kematian, dipenggal, serta kasus lainnya yang tidak teridentifikasi.

Sejak kekerasan di Rakhine, Myanmar, pada Agustus 2017, ratusan ribu Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Mereka menghadapi keterbatasan makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan di kamp pengungsian yang semakin padat. Bantuan darurat sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup mereka, berikut adalah gambaran kebutuhan mendesak yang dihadapi para pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Gambar 2.1 Kebutuhan Pokok Etnis Rohingya



Sumber: ISCG CXB (Relief Web 2017)

Infografis diatas menyoroti kondisi darurat yang dihadapi oleh para pengungsi Rohingya setelah melarikan diri dari konflik di Myanmar. Mereka mengalami berbagai tantangan, termasuk kekurangan makanan, tempat tinggal yang layak, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang memadai, serta sanitasi yang buruk. Kondisi ini menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi dan mencegah semakin memburuknya krisis yang dihadapi.

Setelah kudeta militer pada 1 Februari 2021, ribuan orang Rohingya telah ditangkap oleh pasukan keamanan Myanmar karena melakukan perjalanan tanpa izin. Selain itu, pihak keamanan Myanmar telah memberlakukan pembatasan pergerakan baru dan menghalangi bantuan di kamp dan desa yang dihuni oleh komunitas Rohingya. Oleh karenanya, masyarakat Rohingya di Myanmar dan Bangladesh semakin dilanda keputusasaan setiap tahunnya, seiring dengan peningkatan pembatasan dan memburuknya kondisi di kedua sisi perbatasan (HRW 2023).

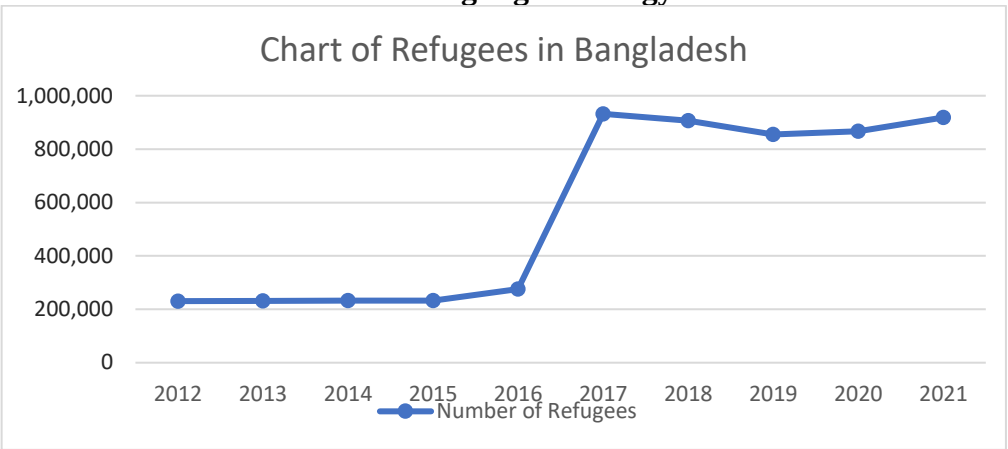
Sementara itu, pengungsi Rohingya di Bangladesh menghadapi hambatan baru dalam hal pergerakan, pendidikan, dan mata pencaharian, yang serupa dengan pembatasan yang mereka alami di Myanmar. Sejak Desember 2021, pihak berwenang Bangladesh telah menerapkan pembatasan terhadap sekolah-sekolah di kamp pengungsian Bangladesh. Tanpa status kewarganegaraan yang diakui, para pengungsi Rohingya berada dalam posisi tidak aman di bawah hukum domestik, sehingga membuat mereka rentan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HRW 2023).

Di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata dan geng kriminal di kamp-kamp pengungsian, pihak berwenang Bangladesh gagal memberikan perlindungan, menjaga ketertiban, atau mengadili para pelaku yang bertanggung jawab. Pihak berwenang Bangladesh beranggapan bahwa pengembalian orang-orang Rohingya ke Myanmar adalah satu-satunya solusi agar tidak terus menghadapi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan (HRW 2023).

Setiap tahun, jumlah korban pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya terus meningkat, terutama terkait dengan kekerasan yang memaksa warga Rohingya untuk mengungsi. Hingga saat ini, konflik etnis Rohingya belum menemukan solusi yang dapat menyelesaikan konflik, meskipun banyak negara dan organisasi internasional terlibat dalam upaya penyelesaiannya. Intensitas kekerasan yang terus dilakukan menyebabkan jumlah pengungsi Rohingya semakin meningkat di beberapa negara, seperti Bangladesh. Etnis Rohingya yang merasa terancam akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak Myanmar, lebih memilih untuk mencari kenyaman dan perlindungan di negara lain.

Konflik pada 2012 yang memuncak pada 2017, serta peristiwa kudeta militer pada 2021 menambah jumlah korban pengungsi dalam skala besar hingga tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2017, jumlah pengungsi yang melarikan diri ke Bangladesh mengalami lonjakan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dalam grafik pengungsi berikut.

Grafik 2.1 Jumlah Pengungsi Rohingya di Baladesh



Sumber: *UNHCR Refugee Statistics; Data Finder* (UNHCR 2025)

2.3 Motivasi Turki Membantu Mengatasi Isu Kemanusiaan Rohingya

Turki telah menunjukkan komitmennya untuk membantu mengatasi konflik etnis yang dialami oleh Muslim Rohingya di Myanmar terkait sebuah masalah yang telah menarik perhatian dunia internasional dalam beberapa tahun terakhir. Motivasi Turki dalam memberikan bantuan kepada Rohingya bukan hanya didorong oleh alasan kemanusiaan semata, tetapi juga oleh prinsip dasar yang sangat dijunjung tinggi oleh negara ini. Sebagai negara dengan sejarah panjang dalam memberikan dukungan kemanusiaan di berbagai belahan dunia, Turki merasa memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak, terutama ketika melihat penderitaan yang dialami oleh etnis Rohingya yang teraniaya (Febriar 2016).

Motivasi Turki dalam membantu Rohingya juga berkaitan dengan hubungan historis yang telah lama terjalin antara Turki dan Myanmar. Di samping itu, Turki merasa penting untuk berperan dalam upaya menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara yang lebih luas, dengan memastikan bahwa konflik etnis ini tidak hanya dilihat sebagai masalah internal Myanmar, tetapi sebagai isu global yang memerlukan perhatian dan tindakan kolektif (Febriar 2016).

TIKA memainkan peran kunci dalam diplomasi kemanusiaan terkait krisis Rohingya. Sebagai lembaga utama dalam menyalurkan bantuan luar negeri Turki, TIKA tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan langsung, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran internasional mengenai penderitaan Rohingya. Melalui TIKA, Turki telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan, bagi pengungsi Rohingya di kamp-kamp di Bangladesh dan wilayah lainnya. TIKA juga berfungsi sebagai alat diplomasi dengan mengajak komunitas internasional untuk lebih peduli terhadap krisis ini, sejalan dengan kebijakan luar negeri Turki yang menekankan solidaritas dengan umat Muslim yang tertindas.

2.3.1 Solidaritas Keagamaan

Sebagai negara yang mayoritas beragama Muslim, Turki merasa memiliki tanggung jawab moral dan religius untuk membantu komunitas Muslim yang tertindas, termasuk Rohingya. Kesamaan identitas antara Turki dan etnis Rohingya yang terletak pada kesamaan dalam memeluk agama Islam, menjadi alasan kuat di balik komitmen Turki untuk mengupayakan penyelesaian konflik yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar. Turki memandang penderitaan Rohingya sebagai isu kemanusiaan yang juga berkaitan dengan solidaritas keagamaan

Dibawah kepemimpinan Erdogan, Turki bertransformasi dari sekularisasi menjadi Islamis melalui kebbijakan-kebijakan politiknya. Turki menjadi negara salah kuat di Eropa yang mayoritas beraga Islam. Kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan tidak hanya berfokus pada transformasi politik dan identitas Islam di Turki, tetapi juga memainkan peran penting dalam diplomasi kemanusiaan, terutama dalam membela dan membantu kaum Muslim yang tertindas di berbagai belahan dunia. Sejalan dengan visinya bahwa "Islam adalah solusi", Erdogan

berusaha mengembalikan kejayaan Turki dengan menegaskan kembali identitas Islam dalam kebijakan dalam dan luar negerinya. Hal ini terlihat dari berbagai langkahnya dalam membantu komunitas Muslim yang mengalami penindasan, termasuk etnis Rohingya di Myanmar (Junaidi 2011).

Sejak konflik internal Myanmar yang semakin memperburuk kondisi Rohingya pada tahun 2012, Turki memberikan bantuan materi sebanyak 3,4 juta lira yang berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Turki Melalui penggalangan dana masal. Selain itu, pemerintah Turki yang diwakili oleh istri Presiden, Emine Erdogan, turun langsung memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok ke daerah kamp-kamp pengungsi yang dihuni oleh etnis Rohingya (Febriar 2016). Hingga saat ini pun Turki terus memberikan bantuan kepada etnis Muslim Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh. Kementerian Luar Negeri Turki bersama dengan perwakilan dari UNHCR melakukan kunjungan untuk memberikan dukungan wilayah dan bantuan kemanusiaan di kamp-kamp pengungsi yang berada di sepanjang perbatasan Bangladesh (Anadolu Agency 2012).

Bantuan yang diberikan Turki tidak hanya bersifat material, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup dukungan politik dan diplomatik melalui kerjasama dengan organisasi internasional seperti OKI. Turki juga aktif menyuarakan penderitaan Rohingya di berbagai forum internasional, mengadvokasi pengakuan hak asasi mereka, dan menyerukan penghentian diskriminasi serta kekerasan yang mereka alami. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Turki memadukan prinsip kemanusiaan dengan identitas keagamaannya dalam merespons krisis global, menjadikannya sebagai salah satu negara yang

paling vokal dan aktif dalam mendukung penyelesaian konflik etnis Rohingya di Myanmar.

2.3.2 Alasan Kemanusiaan

Sebagai negara yang menempatkan humanisme sebagai salah satu pilar penting kebijakan luar negerinya, Turki secara konsisten terlibat dalam memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang rentan, termasuk etnis Rohingya (Fitriyanti and Mutiasari 2018). Selain itu, Turki juga aktif menyuarakan penderitaan Rohingya di forum internasional, seperti PBB dan OKI. Turki menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan nyata guna menghentikan krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya. Presiden Recep Tayyip Erdogan secara pribadi juga sering menyerukan solidaritas global untuk membantu Rohingya, menyebut krisis ini sebagai tragedi kemanusiaan yang harus segera diatasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa selain faktor religius, Turki memandang penderitaan Rohingya sebagai isu universal yang memerlukan perhatian dan bantuan berdasarkan prinsip kemanusiaan.

Menteri Luar Negeri Turki Davutoglu, menyatakan bahwa kebijakan Turki dalam memberikan bantuan kepada Rohingya berdasarkan pada perspektif kemanusiaan. Dalam menerapkan diplomasi kemanusiaan, Turki yang diwakili oleh TIKA dan lemabaga kemanusiaanya lainnya tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan, melainkan menggunakan kepemilikan kekuasaan (*power)* dan kepekaan hati nurani *(conscience).* Davutoglu mengatakan *" Our reason for doing all this is not to intervene in the internal affairs of a country (reffered to Myanmar), but rather to uphold universal humanitarian values by clearly presenting Turkey's*

humanitarian diplomacy perspective", hal ini mencerminkan pendekatan Turki yang berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan luar negerinya, khususnya dalam menangani krisis Rohingya di Myanmar (Febriar 2016).

Davutoglu menegaskan bahwa tujuan Turki bukan untuk campur tangan dalam urusan internal Myanmar, tetapi lebih kepada mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Turki melalui lembaga kemanusiannya berusaha untuk memastikan bahwa hak-hak dasar manusia termasuk hak untuk hidup bebas dari penindasan dan kekerasan dijunjung tinggi, tanpa melihat batas negara atau politik domestik. Dalam hal ini, Turki berupaya untuk menunjukkan bahwa perhatian terhadap penderitaan Rohingya bukanlah tentang mengambil posisi dalam konflik politik domestik Myanmar, tetapi tentang menegakkan hak asasi manusia dan solidaritas kemanusiaan yang lebih besar, yang menjadi dasar bagi diplomasi kemanusiaan Turki (Şeyşane and Tanriverdi-Şeyşane 2022).

BAB 3

UPAYA DIPLOMASI KEMANUSIAN TURKI MELALUI TIKA DALAM KONFLIK ROHINGYA

Turki merupakan salah satu negara yang mengadopsi diplomasi kemanusiaan sebagai instrumen kebijakan luar negerinya. Istilah diplomasi kemanusiaan pertama kali digunakan oleh Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu pada 2013. Menurut Davutoglu, diplomasi kemanusiaan Turki memiliki tiga dimensi utama. Dimensi pertama berkaitan dengan warga negara Turki, yang bertujuan dalam memfasilitasi kehidupan warga negaranya dimanapun mereka berada (Şeyşane and Tanriverdi-Şeyşane 2022).

Dimensi pertama adalah memberikan perhatian penuh terhadap masalah yang dihadapi oleh warga negaranya dan memfasilitasi kehidupan mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, Turki berkomitmen untuk membuka lebih banyak konsulat di berbagai belahan dunia, guna memenuhi kebutuhan warga negaranya yang berada di luar negeri. Dalam hal ini, TIKA mendukung kebijakan Turki dalam melayani warganya di luar negeri, termasuk dalam situasi darurat atau krisis. Sebagai lembaga kemanusiaan dan pembangunan internasional, TIKA membantu warga negara Turki yang membutuhkan bantuan melalui berbagai program, seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial di negara-negara tempat mereka berada. Selain itu, dengan mendirikan kantor di berbagai belahan dunia, TIKA berperan dalam memperkuat jaringan konsuler yang sejalan dengan visi Turki untuk meningkatkan akses dan pelayanan bagi warganya. (Davutoğlu 2013).

Dimensi kedua berfokus pada sikap negara yang berorientasi pada manusia, terutama di zona krisis. Dimensi ini menekankan pentingnya sikap negara yang mengutamakan kemanusiaan, terutama di daerah-daerah yang sedang dilanda krisis. Apapun kondisi dan lokasi seseorang, bagaimana cara sebuah negara merespons dan apa yang disampaikan kepada mereka yang membutuhkan bantuan sangatlah penting (Davutoğlu 2013). Dalam hal ini, TIKA memainkan peran utama dalam menyalurkan bantuan Turki ke daerah-daerah terdampak konflik, seperti Rohingya, Suriah, Palestina, dan Somalia. Dalam kasus Rohingya, TIKA telah mengirimkan bantuan makanan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh serta mengadvokasi kepedulian global terhadap krisis ini. Fokus TIKA dalam memberikan bantuan tanpa memandang batasan politik mencerminkan pendekatan berorientasi pada manusia yang menjadi prinsip dasar diplomasi kemanusiaan.

Dimensi ketiga dari diplomasi kemanusiaan Turki terkait dengan promosi perspektif kemanusiaan yang inklusif di tingkat global. TIKA juga mendukung upaya Turki dalam mereformasi sistem global, terutama dalam konteks kemanusiaan. Dengan memperluas jangkauan bantuannya dan menampilkan model bantuan yang berbasis solidaritas dan kemanusiaan, TİKA memperkuat argumen Turki mengenai perlunya sistem PBB yang lebih adil dan efektif dalam menangani krisis kemanusiaan. Keterlibatan TİKA dalam berbagai inisiatif bantuan internasional menjadi bukti nyata bahwa Turki tidak hanya mengkritik sistem global yang ada, tetapi juga menawarkan solusi melalui aksi nyata. (Davutoğlu 2013).

Ciri khas dari pelaksanaan diplomasi kemanusiaan Turki adalah keragaman aktor, baik aktor negara maupun aktor non-negara dalam prosesnya. Oleh karenanya, Davutoglu menggambarkan aspek diplomasi kemanusiaan Turki sebagai aspek yang memiliki banyak sisi dan saluran, karena pemerintah maupun LSM Turki ikut berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan. Dengan demikian, struktur organisasi diplomasi kemanusiaan Turki melibatkan tiga jenis lembaga yaitu kementerian dan Lembaga negara, *Quasi-Governmental Organization* (QGO), dan *Non-Governmental Organization* (NGO). *Ministry of Foreign Affairs* (MFA), *Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı* (TIKA), dan *Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı* (AFAD) merupakan lembaga utama negara dalam memberikan bantuan kemanusiaan internasional Turki. Bulan Sabit Merah Turki (*Kizilay)* dan *Turkish Diyanet Foundation* (TDF) termasuk kedalam organisasi kuasi-pemerintah yang secara aktif terlibat dalam kegiatan manusia di Turki (Şeyşane and Tanriverdi-Şeyşane 2022).

Dengan ketiga pilar ini, TIKA tidak hanya berperan sebagai penyalur bantuan kemanusiaan, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam melakukan diplomasi kemanusiaan yang berupaya menciptakan solusi jangka panjang bagi komunitas terdampak konflik dan bencana di seluruh dunia. Melalui berbagai inisiatifnya, TIKA tidak hanya memberikan bantuan langsung yang bersifat darurat, tetapi juga berkontribusi dalam membangun ketahanan masyarakat melalui penguatan kapasitas lokal dan infrastruktur jangka panjang. Sebagai bagian dari pilar bantuan kemanusiaan, TIKA secara aktif merespons krisis kemanusiaan dengan menyediakan bantuan medis, pangan, dan infrastruktur dasar bagi masyarakat yang membutuhkan.

3.1 Proses Diplomasi Kemanusiaan TIKA terhadap Etnis Rohingya

TIKA menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi konflik yang terjadi di Rohingya, melalui pengumpulan informasi, melakukan komunikasi, dan mendukung komunitas lokal dan masyarakat Rohingya untuk meningkatkan kapasitas. Pendekatan yang dilakukan TIKA melibatkan berbagai sumber data, mekanisme pemantauan, dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, baik di tingkat domestik maupun internasional. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil berdasarkan pada data akurat dan relevan, sehingga respons kemanusiaan dapat diberikan secara tepat sasaran dan efektif.

Dalam hal ini, TIKA secara aktif mengumpulkan data dan melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi komunitas Rohingya, baik di Myanmar maupun di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Informasi yang dikumpulkan oleh TİKA menjadi dasar bagi kebijakan kemanusiaan Turki agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan efektif. Laporan-laporan ini juga digunakan dalam diplomasi internasional, membantu Turki dalam menekan komunitas global untuk bertindak lebih aktif dalam menangani krisis Rohingya. Selain itu TIKA menjalin kemitraan dengan LSM lain untuk meningkatkan efektivitas bantuan bagi Rohingya di kamp-kamp pengungsi.

3.1.1 Negosiasi Akses Terhadap Etnis Rohingya yang Membutuhkan Bantuan dan Perlindungan

TIKA telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyelesaian konflik yang dialami oleh etnis Rohingya, khususnya dalam bentuk bantuan kemanusiaan kepada para korban yang terdampak. Salah satu bentuk nyata upaya

ini adalah dengan menyalurkan bantuan langsung kepada komunitas Rohingya yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat kekerasan dan diskriminasi di negara bagian Rakhine, Myanmar. Namun, proses dalam menyalurkan bantuan mengalami hambatan dari otoritas Myanmar yang tidak memberikan izin untuk mengakses wilayah-wilayah yang dihuni oleh komunitas Rohingya atau kamp-kamp pengungsian. Pemerintah Myanmar kerap menyangkal adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya dan cenderung menolak keterlibatan pihak luar dalam urusan domestik mereka.

Dalam menghadapi hambatan ini, Presiden Erdogan memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sikap pemerintah Myanmar. Setelah berbagai upaya melalui jalur diplomatik tidak membuahkan hasil yang memuaskan, Presiden Erdogan memutuskan mengambil langkah langsung dengan menghubungi pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Setelah proses negosiasi tersebut, Pemerintah Myanmar mengizinkan TIKA untuk menyalurkan 1.000 ton bantuan kemanusiaan berupa pakaian dan bahan makanan pokok. Hal ini menjadikan TIKA sebagai lembaga bantuan asing pertama yang mendapatkan izin dari pemerintah Myanmar untuk memasuki wilayah tersebut sejak terjadinya kekerasan di wilayah Rakhine (Kaplan 2017).

TIKA bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh untuk mendistribusikan berbagai bentuk bantuan, termasuk makanan, layanan kesehatan, tempat tinggal, serta pendidikan bagi pengungsi di kamp-kamp seperti Cox’s Bazar. Melalui upaya diplomatik yang dilakukan Turki, termasuk kunjungan Menteri Luar Negeri Mevlüt Çavuşoğlu ke Bangladesh pada 2017, TIKA berhasil mendapatkan akses lebih luas untuk menjalankan misinya (Maulana 2017).

Melalui serangkaian negosiasi diplomatik yang telah dilakukan, TIKA berhasil memperoleh izin dari pihak berwenang Myanmar dan Bangladesh untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke kamp-kamp pengungsian yang menampung pengungsi Rohingya. Dalam proses tersebut, Turki berfokus pada pembicaraan yang melibatkan pemerintah Myanmar dan Bangladesh, serta pihak-pihak terkait lainnya, untuk memastikan bahwa bantuan yang sangat dibutuhkan dapat sampai kepada pengungsi yang terjebak dalam kondisi yang memprihatinkan.

3.1.2 Diplomasi TIKA dalam Melakukan Monitoring Bantuan

Setelah memperoleh akses untuk mendistribusikan bantuan kepada pengungsi Rohingya di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh dan Myanmar, TIKA menganggap penting untuk memastikan bahwa bantuan yang telah disalurkan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan tepat sasaran. Monitoring ini menjadi aspek krusial dalam diplomasi kemanusiaan, karena tidak hanya melibatkan penyaluran bantuan fisik, tetapi juga pemantauan dampak jangka panjang dari bantuan tersebut terhadap kehidupan pengungsi Rohingya. Dalam menjalankan monitoring bantuan, TIKA bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan lainnya, organisasi internasional, serta berinteraksi dengan pihak berwenang di Myanmar dan Bangladesh untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Untuk melaksanakan upaya diplomasi kemanusiaan, TIKA membuka *Program Coordination Office* (PCO) di Yangoon, Myanmar pada tahun 2013. Kantor ini berfungsi sebagai pusat koordinasi untuk berbagai proyek bantuan dan pengembangan yang dilakukan oleh TİKA di Myanmar. Dengan adanya PCO di Yangon, TİKA dapat lebih efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan

memantau program-program kemanusiaan serta kerja sama pembangunan, termasuk bantuan untuk komunitas Rohingya dan inisiatif di bidang kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur sosial (Şeyşane and Tanriverdi-Şeyşane 2022).

TIKA juga memiliki kantor perwakilan di Bangladesh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi utama dalam menjalankan berbagai operasi kemanusiaan mereka di kamp-kamp pengungsi Rohingya. Keberadaan kantor perwakilan ini memungkinkan TIKA untuk bekerja lebih dekat dengan para pengungsi, memahami kebutuhan mereka secara langsung, serta merespons situasi darurat dengan lebih cepat dan efektif. Dengan berada di lapangan secara langsung, TIKA dapat mengidentifikasi perubahan kebutuhan pengungsi dan menyesuaikan program bantuan mereka sesuai dengan situasi yang berkembang. Hal ini mencerminkan komitmen TIKA dalam memberikan bantuan jangka panjang yang tidak hanya bersifat darurat tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pengungsi Rohingya dalam jangka waktu yang lebih panjang (Şeyşane and Tanriverdi-Şeyşane 2022).

Dalam praktiknya, TIKA telah aktif dalam berbagai operasi kemanusiaan untuk membantu para pengungsi Rohingya yang berada di kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh. Bantuan yang diberikan mencakup berbagai aspek penting untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi dan meningkatkan kualitas hidup mereka di tengah kondisi yang sulit. Salah satu bentuk bantuan yang diberikan adalah pembangunan rumah bambu sebagai tempat tinggal, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi keluarga pengungsi agar mereka memiliki tempat berlindung yang layak dari cuaca ekstrem dan kondisi lingkungan yang tidak menentu. Selain itu, lembaga kemanusiaan lainnya juga berperan dalam

mendistribusikan makanan, baik dalam bentuk paket bahan makanan yang dapat diolah sendiri oleh pengungsi maupun makanan siap saji yang disediakan untuk mereka yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk memasak (Şeyşane and Tanriverdi-Şeyşane 2022).

TIKA dan *Disaster and Emergency Management Authority* (AFAD) telah secara aktif terlibat dalam pengiriman serta distribusi bantuan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh dan Myanmar. TIKA sebagai lembaga utama dalam implementasi bantuan kemanusiaan Turki, bekerja sama dengan Kedutaan Besar Turki di Naypyidaw serta Pemerintah Daerah Rakhine untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan berjalan dengan efisien. Dalam rangka memberikan dukungan kepada komunitas yang terdampak, dua proyek bantuan kemanusiaan berskala besar telah dilaksanakan (TIKA 2016).

Untuk memastikan distribusi dan dampak bantuan kemanusiaan, TIKA mengadopsi pendekatan pemantauan yang komprehensif, termasuk kunjungan lapangan dan evaluasi langsung. TIKA secara berkala mengirimkan tim ke kamp-kamp pengungsi di Bangladesh untuk menilai kondisi pengungsi dan memastikan bahwa bantuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tim ini juga berkomunikasi langsung dengan pengungsi untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi serta mengevaluasi efektivitas program bantuan yang telah berjalan.

Seperti yang dilansir dalam *website* resmi TIKA, Presiden TIKA Serdar Cam bersama dengan Menlu Mevlut Cavusoglu melakukan kunjungan serta memberikan paket bantuan kepada Muslim Rohingya di kamp-kamp pengungsi Cox’s Bazar, Bangladesh (TIKA 2017). Wakil Presiden TIKA, Dr. Umit Yorulmaz juga melakukan kunjungan resmi selama satu minggu ke Bangladesh untuk

meresmikan berbagai proyek yang telah diselesaikan, serta untuk mengidentifikasi situasi kamp pengungsi di sekitaran Bangladesh. Dalam kunjungannya, Yorulmaz meresmikan Pusat Pendidikan dan Kebudayaan Serbaguna yang dibangun oleh TIKA untuk Muslim Rohingya yang mengungsi di timur kota Cox's Bazar, penyerahan ambulan yang disediakan dan dilengkapi peralatan medis oleh TIKA, upacara pembukaan Rumah Sakit Ibu dan Anak Osman Mia Merchant, upacara pembukaan rumah kaca kultur jaringan yang didirikan oleh TIKA, peresmian kebun jamur untuk anak-anak di yang didirikan TIKA di Chittagong, peresmian klinik keliling yang diinisiasi oleh TIKA, serta meresmikan Gedung Layanan Kantor Koordinasi Program TIKA di Dhaka (TIKA 2023b).

Kunjungan yang dilakukan TIKA bertujuan untuk melakukan penilaian langsung terhadap kondisi kehidupan para pengungsi Rohingya di kamp-kamp pengungsian. Penilaian ini mencakup aspek-aspek penting seperti ketersediaan dan akses terhadap makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, serta fasilitas pendidikan bagi anak-anak pengungsi. Selain itu, tim juga meninjau kondisi tempat tinggal, termasuk kelayakan tempat penampungan serta tingkat kepadatan di kamp-kamp pengungsi.

Dengan melakukan kunjungan langsung, tim dapat memperoleh gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi para pengungsi dalam kehidupan sehari-hari serta mengevaluasi efektivitas bantuan yang telah disalurkan. Kehadiran tim TIKA yang melakukan pemantauan di lapangan, memungkinkan mereka untuk secara langsung mengamati dan mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang mungkin tidak dapat terdeteksi hanya melalui laporan atau data sekunder. Dengan melakukan identifikasi langsung, tim dapat menyusun rekomendasi strategis guna

mengoptimalkan distribusi bantuan, memastikan intervensi yang lebih cepat, serta menyesuaikan program bantuan agar lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi di lapangan.

3.1.3 Diplomasi TIKA dalam Mendukung Individu dan Institusi Lokal

Selain membuat kebijakan berupa pengiriman bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya di Myanmar, TIKA juga berperan aktif dalam mendukung individu dan institusi lokal guna meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial yang berkelanjutan bagi komunitas yang terdampak. Hal ini dilakukan melalui program pelatihan keterampilan, penyediaan sarana dan prasarana, serta kerja sama dengan organisasi kemanusiaan setempat untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap Rohingya, bantuan yang diberikan TIKA fokus pada beberapa sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, serta air dan sanitasi (Beşgül 2024).

Dalam sektor kesehatan, TIKA terlibat dalam pembangunan rumah sakit, penyediaan obat-obatan, serta peningkatan layanan kesehatan di berbagai negara. Selain itu, dalam konteks bantuan darurat dan kemanusiaan, TİKA turut memberikan bantuan kepada negara-negara yang mengalami krisis akibat pandemi maupun konflik. Pendekatan ini sejalan dengan peran TİKA dalam memberikan bantuan medis dan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di Bangladesh dan Myanmar. Misalnya, TİKA telah mendukung fasilitas kesehatan di kamp pengungsian Cox’s Bazar dengan menyediakan peralatan medis, mendirikan klinik keliling, serta memberikan pelatihan bagi tenaga medis lokal. Selain itu, TİKA juga berperan dalam mengoordinasikan distribusi bantuan makanan dan kebutuhan

pokok bagi para pengungsi, yang menunjukkan konsistensinya dalam menanggapi krisis kemanusiaan melalui strategi pembangunan dan bantuan darurat (Beşgül 2024).

TIKA juga bekerja sama dengan Asosiasi Relawan Desa Kesehatan dan Pendidikan *Bir İnsan Dünyaya Bedeldir* (BISEG) melaksanakan inisiatif perawatan kesehatan bagi Muslim Rohingya di Bangladesh. Dalam program ini, tenaga kesehatan sukarelawan dari berbagai provinsi di Turki, bersama dengan perwakilan dari Platform Relawan BISEG, memberikan layanan kesehatan di Pusat Pendidikan dan Kebudayaan Serbaguna TIKA yang terletak di sektor 16 kamp pengungsi Kutupalong di Cox's Bazar. Selain itu, klinik keliling yang disumbangkan oleh TİKA juga berperan aktif dalam menyediakan layanan kesehatan bagi para pengungsi (TIKA 2024b).

TİKA juga telah mendukung tenaga medis di kamp-kamp pengungsian dengan menyediakan peralatan medis untuk ruang operasi di Rumah Sakit Muslim Gratis. Upacara penyerahan peralatan ini berlangsung di Kedutaan Besar Turki di Naypyidaw yang dihadiri oleh Duta Besar Turki untuk Naypyidaw, Kerem Divanlıoglu, masyarakat Muslim terkemuka di Myanmar, staf rumah sakit, serta anggota pers. TIKA berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas rumah sakit ini dengan menghadirkan peralatan medis berkualitas tinggi yang sebagian besar didatangkan langsung dari Turki dan telah dipasang guna memastikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat Myanmar (TIKA 2021b).

Selain pada aspek kesehatan, TIKA juga memberikan bantuan kemanusiaan dalam aspek pendidikan. TIKA mendirikan Pusat Pendidikan dan Kebudayaan Serbaguna yang diresmikan pada tahun 2023, yang berfungsi sebagai pusat

dukungan bagi para pencari suaka dalam berbagai bidang. Pusat ini menawarkan pelatihan kejuruan dalam bidang kerajinan bambu, pertukangan kayu, elektronik, dan menjahit, serta menyediakan ruang untuk kegiatan budaya. Salah satu inisiatif penting yang dilakukan di pusat ini adalah pendirian perpustakaan buku Burma pertama di kamp pengungsian, yang bertujuan untuk membantu para pengungsi dalam melestarikan identitas budaya mereka (TIKA 2024b).

Kemudian TIKA melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur air bersih di daerah pedesaan dengan membangun 42 sumur bor di Distrik Barishal, Bangladesh. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air bersih yang layak, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air minum. Dengan adanya sumur ini, masyarakat setempat termasuk para pengungsi Rohingya dapat memperoleh air bersih yang aman untuk kebutuhan sehari-hari. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen TİKA pada sektor air dan sanitasi dalam upayanya membantu mengatasi permasalahan kesehatan akibat keterbatasan air bersih serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Beşgül 2024).

Selain itu TIKA juga memberikan dukungan dalam pembangunan tempat tinggal bagi para pengungsi Rohingya yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya akibat kekerasan dan konflik di Negara Bagian Rakhine. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak bagi para pengungsi yang selama ini menghadapi kondisi kehidupan yang sangat sulit di kamp-kamp pengungsian, terutama di Cox’s Bazar, Bangladesh. Melalui proyek ini, TİKA membangun unit-unit tempat tinggal yang dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih aman dan nyaman bagi para pengungsi. Pembangunan tempat tinggal sementara ini

disertai dengan fasilitas pendukung seperti sanitasi yang layak, sumber air bersih, serta infrastruktur dasar lainnya guna meningkatkan kualitas hidup para pengungsi (Beşgül 2024)

TIKA telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada etnis Rohingya. Bantuan tersebut mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi Rohingya yang berada di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh. Langkah ini menunjukkan komitmen TIKA dalam meringankan beban yang dialami oleh etnis Rohingya akibat konflik yang berkepanjangan. Upaya yang dilakukan Turki dalam menggunakan TIKA sebagai alat dalam melakukan diplomai kemanusiaan ini merupakan bagian dari strategi diplomasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran global tentang krisis Rohingya. Melalui bantuan ini, Turki memperkuat perannya sebagai negara yang peduli terhadap perlindungan hak asasi manusia dan mendukung solusi damai bagi komunitas yang rentan (Finaldin and Maulani 2023).

TIKA memainkan peran strategis sebagai lembaga utama yang merealisasikan komitmen kemanusiaan Turki di lapangan. TIKA telah mengimplementasikan berbagai program bantuan kemanusiaan di Myanmar dan Bangladesh, termasuk pengiriman makanan, obat-obatan, dan peralatan medis bagi pengungsi Rohingya. Lebih dari sekadar menyalurkan bantuan, TIKA juga mendukung inisiatif yang memperkuat kapasitas lokal. Misalnya, setelah berbagai pertemuan internasional yang menyoroti krisis Rohingya, TIKA mengambil langkah konkret dengan membangun pusat kesehatan dan pendidikan bagi pengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh, yang menjadi tempat penampungan terbesar bagi etnis Rohingya. Selain itu, TIKA berkolaborasi dengan lembaga-

lembaga kemanusiaan lainnya untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat menciptakan solusi jangka panjang (TIKA 2023b).

Dengan demikian, peran Turki dalam forum internasional terkait isu Rohingya tidak hanya berhenti pada diplomasi politik, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata melalui TIKA sebagai instrumen utama diplomasi kemanusiaan Turki. Melalui kombinasi diplomasi dan aksi di lapangan.

Tabel 3.1 Bantuan Turki dan TIKA terhadap Etnis Rohingya

1.	10 Agustus 2012	Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu, bersama dengan Ibu Negara Turki Emine Erdogan mengunjungi kamp pengungsian di Baduba, Myanmar. Dalam kunjungan tersebut, mereka menunjukkan solidaritas langsung kepada komunitas Rohingya yang menjadi korban konflik dan penganiayaan. Kunjungan ini merupakan langkah simbolis yang signifikan, karena jarang ada pejabat tinggi dari negara lain yang langsung mengunjungi wilayah tersebut pada masa itu. Dalam kesempatan tersebut, mereka memberikan bantuan kemanusiaan senilai 3,4 juta lira Turki yang disalurkan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan perlengkapan tempat tinggal bagi para pengungsi. Bantuan ini didistribusikan melalui koordinasi dengan lembaga kemanusiaan Turki, termasuk TIKA dan Bulan Sabit Merah Turki, yang aktif di lapangan (Hurriyet Daily News 2012).
2.	14 November 2013	Menlu Davutoglu bersama dengan delegasi dari OKI melakukan kunjungan resmi ke Myanmar. Dalam

		kunjungan tersebut, mereka bertemu dengan Ketua Komisi Luar Negeri dan sejumlah anggota parlemen dari negara bagian Rakhine. Pertemuan ini memiliki tujuan utama untuk membahas mengenai tindak kekerasan yang semakin meningkat terhadap umat Muslim yang tinggal di negara bagian Rakhine, situasi pengungsi internal yang terpaksa tinggal di kamp-kamp, bantuan kemanusiaan, dan proses demokratisasi di Myanmar. Dalam pertemuan resmi tersebut, Menlu Davutoglu menyatakan bahwa Turki mengusulkan penyusunan rencana aksi mengenai situasi kemanusiaan di Myanmar, serta menjadikan Kedutaan Besar Turki di Naypyidaw sebagai titik kontak resmi OKI di Myanmar. Menlu juga mengusulkan diadakannya pertemuan internasional yang dirancang untuk membangun dialog antara komunitas Muslim dan Buddha di Myanmar (Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs 2013).
3.	2015	Turki menyumbangkan 1 juta dolar AS kepada *International Organization of Migration* (IOM) dan UNHCR untuk bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di Laut Andaman. Di tahun yang sama, semua lembaga dan organisasi kemanusiaan Turki (TIKA, AFAD, dan Bulan Sabit Merah) telah mengerahkan upaya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Indonesia dan Malaysia (Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs 2015).

4.	2017	Presiden Erdogan menghubungi Aung San Suu Kyi secara pribadi untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan darurat (10.000 ton) melalui TIKA kepada kelompok pengungsi Rohingya. Selain itu, sebagai Presiden OKI, Erdogan menghubungi 30 kepala negara dan perdana menteri untuk mencari solusi yang efektif terkait krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh etnis Rohingya (SETA 2017).
5.	2018	TIKA memberikan bantuan makanan dan perlengkapan kepada keluarga yang terkena dampak kebakaran yang terjadi di kamp Kyinyi Pyin di distrik Paktauw di Myanmar. TIKA mengerahkan upaya besar untuk memulihkan rumah-rumah dan mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan mendesak bagi korban yang terdampak kebakaran. Sebanyak 250 orang menerima bantuan darurat berupa selimut, pakaian, kelambu, perlengkapan dapur, dan bahan makanan. Setelah tahap kedua selesai, 60 keluarga akan mendapatkan tempat tinggal (TIKA 2018).
6.	2021	Setelah melihat melihat tempat penampungan bambu yang dibangun pada tahun 2017-2018 telah usang karena kondisi iklim dan banyak yang tidak dapat digunakan, TIKA merenovasi 100 tempat penampungan di kamp pengungsian Rohingya nomor 16. Dengan proyek ini, hunian yang lebih modern dan kuat dibangun di atas tanah yang sama, sehingga memungkinkan pengungsi Rohingya

		memiliki tempat tinggal yang lebih nyaman dan aman (TIKA 2021a).
7.	2023	TIKA terus mendukung umat Muslim Rohingya dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi pengungsi Rohingya di Bhasan Char, Bangladesh. Pada bulan Juli 2023, TIKA mengembangkan proyek di bidang pertanian dan peternakan di pulau tersebut dengan bekerja sama dengan ACLAB, yaitu NGO yang fokus terhadap pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, hak asasi manusia, dan bantuan hukum di Bangladesh. Dalam bidang pertanian, TIKA membuat perkebunan di lahan seluas 1 hektar untuk memasukkan tenaga kerja, serta di bidang peternakan TIKA membangun kandang ternak pertama di pulau tersebut dan menyediakan 16 ekor sapi (TIKA 2023c). Kemudian, TIKA memberikan bantuan kemanusiaan kepada 1.500 keluarga yang terdampak bencana Siklon Mocha di kamp-kamp pengungsi dan pemukiman di sekitar wilayah Sittwe, Rakhine (TIKA 2023a).
9.	2024	Pada bulan Maret, TIKA menyalurkan bantuan berupa penyajian makanan hangat selama bulan Ramadhan di kamp-kamp pengungsi di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya tinggal di Bangladesh (TIKA 2024c).

TİKA berperan sebagai ujung tombak dalam implementasi diplomasi kemanusiaan Turki terhadap krisis Rohingya. Bantuan kemanusiaan yang

disalurkan melalui TİKA bertujuan untuk meredakan penderitaan fisik yang dialami oleh etnis Rohingya akibat pengungsian massal dan kerusakan yang terjadi akibat konflik. Selain menyalurkan bantuan langsung, TIKA juga mendukung upaya diplomasi Turki dalam meningkatkan kesadaran global terhadap krisis Rohingya. Melalui TİKA, Turki tidak hanya berfokus pada bantuan kemanusiaan, tetapi juga aktif dalam berkomunikasi dan bernegosiasi dengan komunitas internasional untuk mendesak negara-negara lain agar memberikan perhatian lebih besar terhadap penderitaan Rohingya. Upaya ini sejalan dengan strategi diplomasi kemanusiaan Turki yang bertujuan untuk menyelesaikan ketegangan antar etnis di Myanmar dan mempercepat resolusi konflik guna menjaga stabilitas kawasan.

Dengan melakukan pendekatan dalam memberikan bantuan langsung, TİKA menjadi alat penting dalam memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia bagi Rohingya. Program-program TİKA juga berfokus pada pembangunan jangka panjang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan komunitas Rohingya di pengungsian.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh TIKA terhadap etnis Rohingya di Myanmar antara tahun 2012-2024 mencerminkan komitmen yang kuat untuk membantu kelompok yang terpinggirkan. TIKA telah mengambil berbagai langkah, termasuk memberikan bantuan langsung, memonitoring bantuan, dan membantu individu dan komunitas lokal Rohingya. Meskipun menghadapi tantangan dalam implementasi, seperti hambatan dari pemerintah Myanmar, Turki berhasil membuka jalur bantuan dan memastikan distribusi bantuan melalui lembaga seperti *Turkish Cooperation and Coordination Agency* (TIKA).

Penelitian ini juga menyoroti perbedaan antara diplomasi kemanusiaan dan diplomasi konvensional, dengan menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh TIKA berfokus pada penyelamatan nyawa dan perlindungan hak asasi manusia tanpa terikat pada kepentingan politik. Melalui upaya ini, Turki tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga berusaha meningkatkan kesadaran global tentang krisis Rohingya dan mendorong solusi jangka panjang. Dengan demikian, diplomasi kemanusiaan Turki melalui Lembaga kemanusiaannya berperan penting dalam merespons krisis yang dihadapi oleh etnis Rohingya, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh TIKA dalam menangani krisis Rohingya tahun

2012-2024 menunjukkan efektivitas dalam merespons keadaan darurat kemanusiaan. Dengan pendekatan yang berfokus pada negosiasi akses, dukungan terhadap individu dan komunitas lokal, serta distribusi bantuan kemanusiaan, TIKA berhasil menyalurkan bantuan serta meningkatkan kesadaran internasional mengenai penderitaan etnis Rohingya.

4.2. Rekomendasi

Penelitian ini masih memiliki peluang untuk disempurnakan, mengingat adanya beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu keterbatasan dalam penelitan ini adalah fokus penelitian yang berfokus pada upaya diplomasi kemanusiaan TIKA dalam membantu etnis Rohingya, sehingga belum mencakup eksplorasi dan perkembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi kekurangan ini dengan pendekatan yang lebih mendalam, data yang lebih luas, serta analisis yang lebih komprehensif untuk memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai diplomasi kemanusiaan dalam konflik Rohingya.

DAFTAR PUSTAKA

Agence France-Presse. 2024. “UN Fears Repeat of 2017 Atrocities Against Rohingyas.” *The Irrawaddy*, August 24, 2024. https://www.irrawaddy.com/news/myanmars-crisis-the-world/un-fears-repeat-of-2017-atrocities-against-rohingyas.html.

Amnesty International. 2015. “Perjalanan Mematikan Krisis Pengungsi Dan Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara.” London. https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA2125742015INDONESIAN.pdf.

———. 2017. “‘ Terpenjara Tanpa Atap ’ Apartheid Di Negara Bagian Rakhine Di Myanmar.” London. https://hrij.amnesty.nl/content/uploads/2017/11/ASA1674842017INDONESIAN.pdf.

———. 2024. “Myanmar: New Attacks against Rohingya a Disturbing Echo of 2017 Mass Violence.” *Amnesty International*, August 21, 2024. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/08/myanmar-new-attacks-against-rohingya-a-disturbing-echo-of-2017-mass-violence/.

Anadolu Agency. 2012. “Turkey Continues Extending Helping Hand to the Rohingya Muslims.” *Anadolu Agency*, August 3, 2012. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-continues-extending-helping-hand-to-the-rohingya-muslims/350428#!

BBC. 2017. “MSF Estimates More than 6,700 Rohingya Killed in Myanmar.” *BBC News*, 2017. https://www.bbc.com/news/world-asia-42348214.

Beşgül, Birce. 2024. “The Evolution of TİKA : A Case Study in Turkish Soft Power

Projection," no. 115, 57–82. https://doi.org/10.36484/liberal.1442299.

Budaya, Budi. 2017. "Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar." *Jurnal Ilmiah Hukum* 11 (1): 106–20. https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/44.

Center of Preventive Action. 2024. "Crisis Myanmar." Global Conflict Tracker. 2024. https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/rohingya-crisis-myanmar.

Chan, Aye. 2005. "The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar)." *SOAS Bulletin of Burma Research* 3 (2): 396–420. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=25d0efc054f99ebb7955071bbfa54dad6018025d.

Chowdury, Rashed Hasan. 2018. "Humanity and Security: Internal and External Dynamics behind the Muslim Rohingya Refugee Crisis, The Role of Turkey and Bangladesh." *Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences* 4 (4): 143–52. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/61714655/published_my_article-libre.pdf?1578477961=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DHumanity_and_Security_Internal_and_Exter.pdf&Expires=1742032346&Signature=AQUIarNQwAQMXu-83IkrxQAJkQ5HGXD1Jn~sdmhY1.

Davutoğlu, Ahmet. 2013. "Turkey's Humanitarian Diplomacy: Objectives,

Challenges and Prospects." *Nationalities Papers* 41 (6): 865–70. https://doi.org/10.1080/00905992.2013.857299.

Farzana, Kazi Fahmida. 2017. *Memories of Burmese Rohingya Refugees*. New York: Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/978-1-137-58360-4.

Febriar, Ringgo. 2016. "Identitas Dan Kebijakan Luar Negeri: Bantuan Kemanusiaan Turki Kepada Etnis Rohingya Pasca Konflik Komunal Myanmar Tahun 2012-2015." *Journal of International Relations* 2 (2): 62–71. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1436024.

Finaldin, Tom, and Anisa Maulani. 2023. "PERAN TURKI DALAM MEMBANTU RESOLUSI KONFLIK ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR TAHUN 2012-2017." *Global Mind* 5 (1): 26–40. https://doi.org/https://doi.org/10.53675/jgm.v5i1.1067.

Fitriyanti, Azizah, and Tia Mutiasari. 2018. "Turki Promosikan Kebijakan Luar Negeri Aktif Dan Humanis." *Antara News*, November 19, 2018. https://www.antaranews.com/berita/769661/turki-promosikan-kebijakan-luar-negeri-aktif-dan-humanis.

Fox, Jonathan. 2003. "Ethnoreligious Conflict in the Late Twentieth Century: A General Theory." *Choice Reviews Online* 41 (02): 41-1204-41–1204. https://doi.org/10.5860/choice.41-1204.

HRW. 2013a. "'All You Can Do Is Pray' Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State." Human Rights Watch. 2013. https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims.

———. 2013b. "Burma: Revoke 'Two-Child Policy' For Rohingya Coerced Birth

Control Reflects Broader Persecution of Muslim Minority." Human Rights Watch. 2013. https://www.hrw.org/news/2013/05/28/burma-revoke-two-child-policy-rohingya.

———. 2013c. "Burma's Bluff on the Two-Child Policy for Rohingyas." Human Rights Watch. 2013. https://www.hrw.org/news/2013/06/21/burmas-bluff-two-child-policy-rohingyas.

———. 2015. "Southeast Asia: End Rohingya Boat Pushbacks Thailand, Malaysia, Indonesia Should Act Urgently to Save Lives." Human Rights Watch. 2015. https://www.hrw.org/news/2015/05/14/southeast-asia-end-rohingya-boat-pushbacks.

———. 2023. "Future Bleak for Rohingya in Bangladesh, Myanmar No Justice, Freedom Since 2017 Atrocities." Human Rights Watch. 2023. https://www.hrw.org/id/news/2023/09/29/future-bleak-rohingya-bangladesh-myanmar.

Hurriyet Daily News. 2012. "FM Davutoğlu Pledges to Help Rohingya Muslims." *Hurriyet Daily News*, 2012. https://www.hurriyetdailynews.com/fm-davutoglu-pledges-to-help-rohingya-muslims-27556.

Ibrahim, Azeem. 2016. *The Rohingyas: Inside Myanmar's Genocide*. *Hurst & Company, London*. London: C. Hurst & Co. file:///C:/Users/ACER/Downloads/The Rohingyas_ Inside Myanmar's Hidden Genocide (PDFDrive).pdf.

Ichikaya Mitzy, Gulia. 2017. "Perlawanan Etnis Muslim Rohingya Terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar." *Global South Review* 1 (2): 153. https://doi.org/10.22146/globalsouth.28836.

International Criminal Court. 2019. Investigation into the Situation between Bangladesh/Myanmar. ICC-01/19, issued 2019. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2019_03510.PDF.

Junaidi, Ahmad. 2011. "Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan Dan Islamisme Turki Kontemporer." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 6 (1): 142–200. https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v6i1.1444.

Kaplan, Enes. 2017. "Turkey Giving 1,000 Tons of Aid to Myanmar Rohingya." *Anadolu Agency*, September 6, 2017. https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/turkey-giving-1-000-tons-of-aid-to-myanmar-rohingya/902077.

Karina, Maria Elsa. 2020. "Analisa Perbandingan Kebijakan Malaysia Dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya." *Padjadjaran Journal of International Relations* 2 (2): 158. https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26770.

Khan, Abdullah. 2024. "The Inhumane Conditions in Cox's Bazar and What Must Be Done to Support Refugees Looking for a Dignified, Hopeful Future." Amnesty International Australia. 2024. https://www.amnesty.org.au/the-inhumane-conditions-in-coxs-bazar-and-what-must-be-done-to-support-refugees-looking-for-a-dignified-hopeful-future/#.

Maulana, Victor. 2017. "Telepon Suu Kyi, Erdogan Sebut Dunia Islam Khawatir Dengan Krisis Rohingnya." *SINDOnews*, September 5, 2017. https://international.sindonews.com/berita/1236917/43/telepon-suu-kyi-erdogan-sebut-dunia-islam-khawatir-dengan-krisis-rohingnya.

Merici Siba, M. Angela, and Anggi Nurul Qomari'ah. 2018. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human Right Violations on Rohingya Conflict." *Journal of Islamic World and Politics* 2 (2): 367–85.

https://doi.org/10.18196/jiwp.2221.

Minear, Larry. 2007. “The Craft of Humanitarian Diplomacy.” In *Humanitarian Diplomacy : Practitioners and Their Craft / Edited by Larry Minear and Hazel Smith*, edited by Larry Minear, 7–35. New York: United Nations University Press. https://digitallibrary.un.org/record/602125?ln=en&v=pdf.

Minear, Larry, and Smith Hazel. 2007. *Humanitarian Diplomacy: Practitioners and Their Craft Edited by Larry Minear and Hazel Smith*. Edited by Larry Minerar and Hazel Smith. New York: United Nations University Press. file:///C:/Users/ACER/Documents/Humanitariandiplomacy.pdf.

Moh, Rosyid. 2019. “GENOSIDA ETNIS MUSLIM ROHINGYA DAN PARTISIPASI INDONESIA DALAM BINA DAMAI.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14 (2): 159–96. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24042/ajsla.v14i2.5613.

Mohajan, Haradhan Kumar. 2018. “History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims.” *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies* 2 (1): 19–46. https://jurnal.ugm.ac.id/ikat/article/view/37391/21570.

MSF. 2017. “MSF Surveys Estimate That at Least 6,700 Rohingya Were Killed during the Attacks in Myanmar.” Médecins Sans Frontières. 2017. https://www.msf.org/myanmarbangladesh-msf-surveys-estimate-least-6700-rohingya-were-killed-during-attacks-myanmar.

———. 2023. “Rohingya Youth Trapped in Violence and Despair in Cox’s Bazar.” Medecins Sans Frontieres. 2023. https://www.msf.org/rohingya-youth-trapped-violence-and-despair-coxs-bazar.

———. 2024. “Trapped and Forgotten: Where Can Rohingya People Seek Safety?”

Medecins Sans Frontieres. 2024. https://www.msf.org/trapped-and-forgotten-where-can-rohingya-people-seek-safety.

Murdiyanto, Dr. Eko. 2020. *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*. *Jurnal EQUILIBRIUM*. 1st ed. Vol. 5. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press. http://eprints.upnyk.ac.id/24095/1/Penelitian Kualitatif -Eko mUrdiyanto.pdf.

O'Brien, Melanie, and Gerhard Hoffstaedter. 2020. "'There We Are Nothing, Here We Are Nothing!'—The Enduring Effects of the Rohingya Genocide." *Social Sciences* 9 (11): 1–16. https://doi.org/10.3390/socsci9110209.

Relief Web. 2017. "Rohingya Refugee Crisis Needs and Response Infographic (15 October 2017)." Relief Web. 2017. https://reliefweb.int/report/bangladesh/rohingya-refugee-crisis-needs-and-response-infographic-15-october-2017.

Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs. 2013. "OIC Contact Group on Rohingya Muslims Holds Contacts in Naypyidaw." Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs. 2013. https://www.mfa.gov.tr/oic-contact-group-on-rohingya-muslims-holds-contacts-in-naypyidaw.en.mfa.

———. 2015. "No: 160, 20 May 2015, Press Release Regarding the Delivery of Humanitarian Aid to the Rohingyas and Bengalis Stranded in the Andaman Sea." Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs. 2015. https://www.mfa.gov.tr/no_-160_-20-may-2015_-press-release-regarding-the-delivery-of-humanitarian-aid-to-the-rohingyas-and-bengalis-stranded-in-the-andaman-sea.en.mfa.

SETA. 2017. "Turkey Leads Global Humanitarian Diplomacy for the Rohingya."

SETA. 2017. https://www.setav.org/en/law-and-human-rights/turkey-leads-global-humanitarian-diplomacy-for-the-rohingya.

Şeyşane, Volkan, and Görkem Tanriverdi-Şeyşane. 2022. "States as 'Humanitarians': The Turkish Brand of Humanitarian Diplomacy 'Yardımsever' Olarak Devletler: Türk Tipi İnsani Diplomasi." *Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi • Marmara University Journal of Political Science • Cilt* 10 (1): 153–78. https://doi.org/10.14782marmarasbd.993408.

Smith, Hazel. 2007. "Humanitarian Diplomacy: Theory and Practice." In *Humanitarian Diplomacy : Practitioners and Their Craft / Edited by Larry Minear and Hazel Smith.*, edited by Hazel Smith, 36–62. New York: United Nations University Press. file:///C:/Users/ACER/Documents/Humanitariandiplomacy.pdf.

Susanti, Aviantina. 2014. "PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL." *Brawijaya Law Student Journal* 1 (2): 4. https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/349.

TIKA. 2016. "Humanitarian Aid to 700 Thousand People in Arakan." Republic of Turkiye Ministry of Culture and Tourism Turkish Cooperation and Coordination Agency. 2016. https://tika.gov.tr/en/detail-humanitarian_aid_to_700_thousand_people_in_arakan/.

———. 2018. "TİKA Heals Wounds in Myanmar." Republic of Turkiye Ministry of Culture and Tourism Turkish Cooperation and Coordination Agency. 2018.

https://tika.gov.tr/en/detail-tika_heals_wounds_in_myanmar/.

———. 2021a. “TİKA Renovated the Houses of Rohingya Refugees.” Republic of Turkiye Ministry of Culture and Tourism Turkish Cooperation and Coordination Agency. 2021. https://tika.gov.tr/en/detail-tika_renovated_the_houses_of_rohingya_refugees/.

———. 2021b. “TİKA Supports a Hospital in Myanmar.” Republic of Turkiye Ministry of Culture and Tourism Turkish Cooperation and Coordination Agency. 2021. https://tika.gov.tr/en/detail-tika_supports_a_hospital_in_myanmar/.

———. 2023a. “Humanitarian Aid from TİKA to Myanmar.” Republic of Turkiye Ministry of Culture and Tourism Turkish Cooperation and Coordination Agency. 2023. https://tika.gov.tr/en/detail-humanitarian_aid_from_tika_to_myanmar/.

———. 2023b. “TİKA’s Projects in Various Sectors Put into Service in Bangladesh.” Republic of Turkiye Ministry of Culture and Tourism Turkish Cooperation and Coordination Agency. 2023. https://tika.gov.tr/en/detail-tika%27s_projects_in_various_sectors_put_into_service_in_bangladesh/.

———. 2023c. “TİKA Continues to Support Arakanese Muslims with Agriculture and Livestock Activities.” Republic of Turkiye Ministry of Culture and Tourism Turkish Cooperation and Coordination Agency. 2023. https://tika.gov.tr/en/detail-tika_continues_to_support_arakanese_muslims_with_agriculture_and_livestock_activities/.

———. 2024a. “About Us.” Republic of Turkiye Ministry of Culture and Tourism

Turkish Cooperation and Coordination Agency. 2024. https://tika.gov.tr/en/institutional/about-us/.

———. 2024b. “TİKA and BİSEG Deliver Health Services to Rohingya Muslims in Bangladesh.” Republic of Turkiye Ministry of Culture and Tourism Turkish Cooperation and Coordination Agency. 2024. https://tika.gov.tr/en/tika-and-biseg-deliver-health-services-to-rohingya-muslims-in-bangladesh/.

———. 2024c. “TİKA Serves Iftar Dinner to Rohingya Families in Refugee Camp During Ramadan.” Republic of Turkiye Ministry of Culture and Tourism Turkish Cooperation and Coordination Agency. 2024. https://tika.gov.tr/en/tika-serves-iftar-dinner-to-rohingya-families-in-refugee-camp-during-ramadan/.

UNHCR. 2022. “Myanmmar Situation.” UNHCR Global Focus. 2022. https://reporting.unhcr.org/myanmar-situation-global-report-2022#:~:text=3%2C700 Rohingya%2C almost half of,of 360%25 compared to 2021.

———. 2023a. “14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya.” *UNHCR Indonesia*, 2023. https://www.unhcr.org/id/54329-14-fakta-mengenai-pengungsi-rohingya.html?utm_source.

———. 2023b. “Myanmar Situation.” UNHCR Global Rocus. 2023. https://reporting.unhcr.org/myanmar-situation-global-report-2023.

———. 2025. “Refugee Data Finder.” UNHCR The UN Refugee Agency. 2025. https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download?data-finder=on&data_finder%5BdataGroup%5D=displacement&data_finder%5Bdataset%5D=population&data_finder%5BdisplayType%5D=totals&data_fin

der%5BpopulationType%5D%5B%5D=REF&data_finder%5Byear__filterType%5D=cu.

Waluyo, Tri Joko. 2013. “Kinflik Tak Seimbang Etnis Rohingya Dan Etnis Rakhine Di Myanmar.” *Transnasional* 4 (2): 838–52. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/50875837/isu_rohingya-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1634455854&Signature=RLidQ7Blq8E3eve4VPiKcJF1UYE069BxL2wcnCoGzocB7QRObEzxgcWvApwY4YQXjMoIb61-j-i-zTB~0wbTBl13uLN4Tq96LjjdkijYegqOSCZWW2KzU~5IxtONZLpsl3xUqKXXfRw-LQE.